



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
KOMISI III RAKER DAN RDP DENGAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
RI, KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME RI, KETUA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN RI, KETUA KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA, KOMNAS PEREMPUAN, DAN
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL RI**

Tahun Sidang : 2021/2022
Masa Persidangan : V
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Tertutup
Hari/Tanggal : Kamis, 25 Agustus 2022
Waktu : 10.00 s.d. 12.10 WIB
Ketua Rapat : Pangeran Khairul Saleh/Wakli Ketua/ F.PAN
Sekretaris Rapat : Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi
III DPR RI
Acara : Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
dan Pemeriksaan BPK Semester I dan II Tahun
Anggaran 2021.
Hadir : **A. Anggota Komisi III:**
Hadir 37 dari 53 Anggota Komisi III

PIMPINAN : 4 dari 5 Pimpinan

1. Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A (Ketua/ F-PDIP)
2. Dr.Ir.H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (Wakil
Ketua/ F-PG)
3. H. Desmond Junaidi Mahaesa, S.H., M.H.
(Wakil Ketua/ F-Partai Gerindra)
4. Ir. Pangeran Khairul Saleh. M.M. (Wakil Ketua
/F-PAN)

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN: 11 dari 11 Anggota:**

1. Ichsan Soelistio
2. Trimedya Panjaitan, S.H., M.H.

/3. Drs. Nurdin, M.M.

3. Drs. Nurdin, M.M.
4. Gilang Dhielafararez, S.H., L.L.M.
5. Dede Indra Permana, S.H.
6. H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
7. Johan Budi Sapto Pribowo
8. I Wayan Sudirta, S.H.
9. H. Agustiar Sabran, S.Kom.
10. Novri Ompusunggu, S.H., M.H.
11. Irjen Pol (Purn) Drs.H. Safaruddin

FRAKSI PARTAI GOLKAR:

4 Anggota dari 7 Anggota:

1. Hj. Adde Rossi Khoerunnissa, S. Sos., M.Si.
2. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.
3. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M. Kn.
4. Supriansa, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GERINDRA:

5 Anggota dari 7 Anggota:

1. Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.
2. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M. Hum.
3. Siti Nurizka Jaya, S.H., M.H.
4. Bimantoro Wiyono, S.H.
5. Drs. H. Syaiful Rasyid, M.M.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

2 Anggota dari 5 Anggota:

1. Y. Jacki Uly
2. Ary Egahni Ben Bahat, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

3 Anggota dari 5 anggota:

1. H. Moh. Rano Al Fath, S.H., M.H.
2. H. Cucun Ahmad Syamsurijal., M.A.P.
3. Heru Widodo, S. Psi.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

1 Anggota dari 5 Anggota:

Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H., Accs.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 Anggota dari 4 Anggota:

1. H.M. Nasir Djamil, M.Si.
2. Drs. H. Adang Daradjatun.
3. Dr.H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H.

/FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**3 Anggota dari 3 Anggota:**

1. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
2. H. Nazaruddin Dek Gam.
3. Mulfachri Harahap, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**1 Anggota dari 1 Anggota:**

H. Arsul Sani, S.H. M.Si.

B. UNDANGAN:

1. Ketua Komnas HAM beserta jajaran;
2. Kepala BNN beserta jajaran;
3. Deputi I BNPT beserta jajaran;
4. LPSK beserta jajaran

JALANNYA RAPAT:**KETUA RAPAT:**

Bisa kita mulai Pak, biar ini cepet kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, baik yang hadir secara fisik maupun secara *virtual*,

Yang saya hormati Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,

Yang saya hormati Kepala Badan Narkotika Nasional,

Yang saya hormati Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,

Yang saya hormati Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

Yang terhormat Ketua Komnas Perempuan, maaf Bu, ketinggalan, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia,

Alhamdulillah wasyukurillah kita disiapkan oleh Allah bisa bekerja, berkarya sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing dan pada hari ini kita dipertemukan dalam rapat kerja atau rapat dengar pendapat Komisi III dalam rangka pembahasan pelaksanaan fungsi anggaran.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi III DPR RI, berdasarkan daftar hadir secara fisik dan *virtual*, telah hadir 7 dan telah hadir 20 dari 53 Anggota Komisi III DPR RI, yang terdiri atas 7 fraksi dari 9 fraksi di DPR. Dengan demikian, kuorum telah

terpenuhi, sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib maka pekernankan kami membuka rapat kerja dan rapat dengar pendapat pada hari ini dan rapat dinyatakan, tertutup atau terbuka untuk umum? Tertutup saja.

(RAPAT: SETUJU)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan kementerian /lembaga mitra kerja Komisi III atas kesediaannya memenuhi undangan kami pada hari ini yang dilaksanakan secara fisik dan *virtual*. Kami menawarkan, kami minta persetujuan mengenai acara rapat pada hari ini:

Pertama, Penjelasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2021 dan Penjelasan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK tahun anggaran 2021.

Jadi, penjelasannya singkat ya, Pak, ya, 10 menit, 10 menit aja. Kita jam 12 harus selesai. Kalau bisa sebelum jam 12.00

Dua, pendalaman atau diskusi. Ketiga, kesimpulan, dan empat, penutup.

Kami juga ingin mendapatkan persetujuan, apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pukul 12 ya, ya baik 12.

(RAPAT: SETUJU)

Hadirin yang kami hormati,

Komisi III DPR RI melaksanakan rapat terkait fungsi anggaran ini berdasarkan atas surat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI nomor B/12412/.04.01/02/2022, tanggal 29 Juni 2022, perihal Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2021 dan Rancangan Jadwal Pembahasan Rancangan Undang Undang tentang APBN Tahun 2023.

Komisi III DPR RI juga akan membahas Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK terhadap Pemerintah pada tahun anggaran 2021 yang lalu. Hampir semua mitra Komisi III terdapat catatan yang perlu sama-sama kita tindak lanjuti.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf h dan huruf i, serta Pasal 176 Peraturan DPR RI Nomor I Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan surat Pimpinan Badan Anggaran maka dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran, Komisi III ingin mendapatkan penjelasan dari mitra-mitra kerja Komisi III terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN dan Pemeriksaan Semester BPK tahun anggaran 2021.

Untuk itu, kami persilakan kepada Kepala BNPT untuk memberikan penjelasan, selanjutnya oleh Kepala BNN, Ketua LPSK, Ketua Komnas HAM RI, dilanjut dengan Komnas Perempuan, dan terakhir Sekjen KY.

Kami persilakan, Pak Boy, 10 menit ya, Pak, maksimal.

KEPALA BNPT (KOMJEN. POL. DR. BOY RAFLI AMAR, M.H):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi,
Salam sejahtera,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Yang terhormat Pimpinan Komisi III DPR RI, beserta yang mulia dan yang terhormat seluruh Anggota Komisi III DPR RI.

Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hal-hal yang telah dimintakan kepada kami.

Kami laporkan pertama, kaitan masalah anggaran BNPT pada tahun 2021, bahwa mengalami *refocusing* sebanyak empat kali dengan total sebesar Rp130.652.406.000,00 setelah *refocusing* maka anggaran BNPT pada tahun 2021 menjadi Rp385.267.038.000,00 dengan total penyerapan anggaran berdasarkan laporan Sistem Akuntansi Instansi BNPT tahun 2021 sampai dengan 31 Desember adalah Rp383.144.127.505,00 atau 99,45%.

Adapun perincian penggunaannya, yang pertama adalah belanja pegawai dengan nilai realisasi sebesar Rp35.090.027.651,00 atau 99,61% dan belanja barang dengan nilai Rp284.455.970.766,00 99,33% dari anggaran Rp286.387.050.000,00, sedangkan belanja modal Rp63.598.129.088,00 atau 99,92%.

Sementara realisasi berdasarkan program BNPT dengan rincian adalah sebagai berikut, pertama, dukungan administrasi dan SDM senilai Rp.98.041.846.196,00 dengan penyerapan 99,88%, penanggulangan terorisme bidang pencegahan realisasi Rp95.478.953.187,00 atau 100,35%, penanggulangan terorisme bidang penindakan dengan realisasi sebesar Rp82.592.328.450,00 atau 100,08%, penanggulangan terutama bidang kerja sama internasional sebesar Rp16.682.183,00 atau 99,95%, pengawasan Internal dengan realisasi sebesar Rp1.627.843.876,00 atau 99,81%.

Dari realisasi belanja sebesar Rp385.423.154.945,00 atau 100,04% terdapat pengembalian sebesar Rp2.279.027.440,00 sehingga realisasi BNPT adalah sebesar Rp383.144.127.505,00;

Dalam rangka pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN 2021 dan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan dan laporan keuangan pusat tahun 2021 maka dilakukan peningkatan kualitas informasi laporan keuangan terkait pengungkapan mengenai anggaran, realisasi, dan pencapaian rincian *output*, khusus target dan output dari prioritas nasional dan program visi P PEN di tahun 2021.

Sebagaimana ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2021, berdasarkan program kegiatan dalam rangka pencapaian target *output* strategis diamanahkan kepada BNPT berupa koordinasi peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan terorisme, sebagaimana dinyatakan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, pagu anggaran prioritas nasional BNPT adalah Rp113.535.161.000,00 dan total realisasi sebesar Rp113.525.193.766,00.

Beberapa program di antaranya antara lain, pertama, Deradikalisasi terhadap Masyarakat Terpapar Paham Radikalisme dengan alokasi anggaran Rp29.896.623.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp29.891.226.190,00 atau 99,98%.

Yang kedua, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.729.688.007,00 dan realisasi sebesar Rp18.726.655.210,00 atau 99,98%, dan kami laporkan FKPT kami menjadi loncat 30, dengan penambahan FKPT di Papua dan Papua Barat.

Ketiga, Kontra Radikalisasi dengan alokasi anggaran Rp38.898.320.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp38.896.160.159,00 atau 100%. Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional, dengan alokasi Rp450.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp449.636.600,00. Kasus Tindak Pidana Terorisme yang Berkekuatan Hukum Tetap, dengan alokasi anggaran Rp8.341.944.000,00 dengan realisasi 100%. Sasaran Wilayah Pelibatan Secara Terpadu Kementerian dan....

Anggota Komisi III:

Pimpinan....

KETUA RAPAT:

Silakan.

Anggota Komisi III:

Mungkin untuk meringankan pembacaan, misalnya Kasus Tindak Pidana Terorisme Berkekuatan Hukum Tetap, itu delapan miliar. Jadi, dengan realisasi 100%, Sasaran Wilayah Pelibatan Secara Terpadu 14 miliar lebih, realisasi 99,99%, karena *kan* kita sama sama baca. Maksudnya meringankan beban kepada lembaga menyampaikan. Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Setuju. Pak Boy, silakan lanjutkan, Pak.

KEPALA BNPT (KOMJEN. POL. DR. BOY RAFLI AMAR, M.H):

Terima kasih. Enam, Sasaran Wilayah Pelibatan Secara Terpadu Kementerian dan Lembaga, Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme sebesar empat belas miliar lebih dengan realisasi 99,99%.

Ketujuh, Koordinasi Peran Serta Masyarakat Dan Pemerintah dalam Pencegahan Terorisme sebesar tiga miliar lebih, dengan realisasi 99,99%.

Kami melaporkan hasil Pemeriksaan BPK Semester I dan Semester II Tahun Anggaran 2021.

Pimpinan sidang yang kami hormati dan kami banggakan,

Sesuai dengan hasil laporan pemeriksaan BPK RI atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK menyampaikan hasil audit dan rekomendasi sebagai berikut.

Yang pertama, kekurangan volume pekerjaan atas kegiatan belanja pemeliharaan pada Sekretaris Utama yang mengakibatkan indikasi kerugian sebesar 202 juta lebih.

Rekomendasi BPK terhadap temuan tersebut adalah agar Kepala BNPT melalui Sestama BNPT memerintahkan PPK mempertanggungjawabkan indikasi kerugian negara yang berasal dari kekurangan pekerjaan yang telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar empat puluh juta lebih.

Kemudian, kesalahan klasifikasi anggaran belanja BNPT sebesar 590 juta lebih dan belum dikapitalisasi sebesar 174 juta lebih. Hal ini terus, hal tersebut mengakibatkan aset lainnya kurang disajikan dan realisasi belanja yang tidak sesuai peruntukannya.

Rekomendasi BPK terhadap temuan tersebut adalah agar Kepala BNPT melalui Sekretaris Utama memerintahkan Kepala Biro Perencanaan, memperingatkan Kepala Bagian Perencanaan untuk lebih cermat dalam melakukan penyusunan rencana anggaran sesuai dengan substansi kegiatan dengan berpedoman pada bagan akun standar yang telah ditindaklanjuti dengan melakukan koreksi salah saji sebesar 140... 174 juta lebih, dan tersebut pada laporan keuangan melalui koordinasi, konsultasi kepada Direktorat, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, BNPT serta mengeluarkan surat perintah dari Sestama kepada Kepala Bagian Perencanaan tanggal 19 Agustus tentang perintah untuk lebih cermat dan melakukan penyusunan rencana anggaran sesuai substansi kegiatan dengan berpedoman pada Bagan Akun Standar, dan surat

Sekretaris Sestama tanggal 19 Agustus 2022 tentang perintah untuk lebih meningkatkan pengawasan atas penyusunan rencana dan realisasi anggaran belanja, untuk memastikan permasalahan tersebut tidak terulang kembali.

Yang ketiga, pengendalian belanja pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas pada BNPT belum memadai, yang mengakibatkan pemborosan belanja pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas sebesar 664 juta lebih. Rekomendasi BPK terhadap temuan tersebut adalah agar Kepala BNPT memerintahkan Sestama menyusun *standard operating procedure*, yang mengatur pelaksanaan dan pengendalian biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan telah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat perintah Sestama pada tanggal 19 Agustus tentang perintah untuk membuat *standard operating procedure* yang mengatur pelaksanaan dan pengendalian biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional.

Saat ini SOP tentang Pemakaian, Pemeliharaan, Dan Pengeluaran Penggunaan Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Dinas Operasional Atau Kendaraan Dinas Jabatan di lingkungan badan dalam BNPT dalam tahap finalisasi dan *review* berjenjang untuk memastikan, bahwa SOP tersebut memadai untuk pengendalian biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional.

Empat, kelebihan pembayaran atas pekerjaan jasa perencanaan konstruksi sebesar empat puluh empat juta rupiah. Rekomendasi BPK terhadap temuan tersebut adalah agar Kepala BNPT melalui Sekretaris Utama menginstruksikan kepada PPK lebih cermat dalam melakukan pengujian dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang berada penguasaan, yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran sebesar empat puluh empat juta rupiah ke kas negara dan menerbitkan Surat Perintah Sestama tanggal 19 Agustus tentang perintah untuk lebih cermat dalam melakukan pengujian dokumen pertanggungjawaban atas perintah pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

Kelima, pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas belum sesuai ketentuan, mengakibatkan belanja perjalanan dinas tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar 547 juta 530 juta lebih, indikasi kerugian atas perjalanan dinas RP12.300.000,00, dan pemborosan sebesar dua puluh satu juta lebih, potensi kerugian atas kekurangan bukti pertanggungjawaban sebesar sembilan puluh dua juta lebih.

Rekomendasi BPK terhadap temuan tersebut adalah agar Kepala BNPT memerintahkan Sekretaris Utama BNPT melakukan reuiu atas Surat Edaran Sestama BNPT Nomor 4 Tahun 2021, yang telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Edaran tanggal 22 Agustus tentang penerapan *at cost* dalam pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan di lingkungan BNPT.

Yang keenam, penatausahaan pengamanan barang milik negara berupa aset tetap belum tertib. Hal tersebut mengakibatkan aset berpotensi hilang, disalahgunakan, dapat menimbulkan gugtan pihak ketiga di masa yang akan datang. Rekomendasi BPK terhadap temuan tersebut adalah agar Ka BNPT melalui Sekretaris Utama

memerintahkan Kepala Biro Umum selaku pengguna barang untuk melakukan inventarisasi barang-barang kesenian dan tanaman hias serta lebih optimal dalam mengamankan aset hibah tanah, yang telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Sekretaris Utama pada tanggal 19 Agustus 2022 tentang perintah untuk lebih optimal melakukan pengendalian aset dan Surat Perintah Sekretaris Utama pada tanggal 19 Agustus tentang perintah melakukan inventarisasi aset barang-barang kesenian dan tanaman hias, serta optimal dalam mengamankan aset tanah hibah.

Kemudian, selain menindaklanjuti berupa pengembalian ke kas negara, telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang bersifat administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun kekurangan pengembalian ditargetkan tuntas tanggal 31 Desember 2022. Dan kami laporkan bahwa juga hasil dari Laporan Pemeriksaan BPK RI telah memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian terhadap BNPT dalam pemeriksaan tahun anggaran 2021.

Sementara itu dapat... yang dapat kami laporkan, Pimpinan, dan pada kesempatan ini kami juga sedikit reviu kembali, melaporkan kembali, sedikit berkaitan dengan upaya-upaya kami dalam proses penanggulangan, yaitu kami terus melakukan transformasi penguatan wawasan kebangsaan, terutama adalah Penguatan Empat Konsensus atau Empat Pilar Kebangsaan.

Yang kedua, kami terus melakukan bersama dengan lembaga terkait untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila sampai ke tingkat *grass roots*, dalam hal ini kami bersama dengan BPIP terus merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan modul bagi kalangan generasi muda kita.

Yang ketiga, kami melakukan terus upaya transformasi terkait dengan masalah moderasi dalam beragama. Yang keempat, kami terus melakukan upaya penanggulangan berbasis kepada pembangunan kesejahteraan, bagi kalangan *ex napiters*. Dan yang kelima, kami juga terus melakukan upaya penguatan nilai-nilai adat budaya nusantara.

Yang kami yakini, lima upaya transformasi yang kita lakukan ini adalah sebagai satu penguatan dalam rangka mempersempit ruang gerak ideologi terorisme yang berkarakter anti dengan konstitusi kita, anti dengan NKRI, bersifat transnasional, demikian juga bersifat intoleran dan radikal. Yang ketiga, senantiasa menggunakan... penyalahgunaan narasi agama dalam kegiatan-kegiatan mereka, yang berikutnya adalah anti terhadap kemanusiaan dan menghalalkan segala cara.

Kami berkeyakinan dengan segala upaya-upaya vaksinasi yang kami sampaikan tadi, akan memperkuat, memperkuat ketahanan bangsa kita dalam menghadapi ideologi terorisme yang menyebar luas dalam masyarakat kita.

Sementara demikian, Pimpinan. Berikut, terakhir kami izin menyampaikan sebuah pantun, Bapak Pimpinan.

Buah sawo, buah kedondong,
tidak termasuk buah berduri,
Komisi III ayo dong bersama BNPT menjaga NKRI.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih, Pak Kepala BNPT. Selanjutnya kami persilakan Kepala BNN. Sepuluh menit, Pak, ya?

KEPALA BNN RI (DR. PETRUS R. GOLOSE):

Ya, Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan.

KEPALA BNN RI (DR. PETRUS R. GOLOSE):

Yang terhormat Pimpinan Komisi III DPR RI, dan Anggota Komisi III, dan hadirin sekalian,

Selamat pagi.

Salam sehat dan bahagia tanpa narkoba.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan, karena atas perkenan-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat hadir pada rapat kerja bersama Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023.

Dasar rapat kerja hari ini adalah surat dari Wakil Ketua DPR RI perihal undangan rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan acara Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2021. Kedua, pembahasan hasil pemeriksaan BPK Semester I dan II Tahun 2021.

Pada tahun anggaran 2021, BNN RI memperoleh alokasi anggaran sebesar satu triliun empat ratus tiga puluh miliar sekian. Apabila dibandingkan dengan anggaran tahun 2020 terdapat penurunan sekitar Rp229 miliar atau 12,8%. Sampai dengan akhir

tahun 2021, realisasi anggaran tersebut mencapai 98,22%. Besaran realisasi anggaran tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2020 yang mencapai 94,18%.

Adapun komposisi realisasi anggaran tahun 2021 tersebut terdiri dari, belanja pegawai sebesar 494 miliar sekian atau 99,51%, belanja barang sebesar 470 miliar sekian atau 97,50%. Sementara itu, realisasi anggaran belanja modal sebesar 49 miliar sekian atau 98,02%. Keberhasilan dalam meningkatkan realisasi ini, antara lain, disebabkan karena sejak awal tahun anggaran seluruh satker diminta untuk membuat perencanaan bulanan penarikan dana dan kemudian mengimplementasikan sesuai dengan rencana tersebut.

Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan Komisi III DPR RI yang saya banggakan, serta hadirin sekalian,

Melalui yang alokasi anggaran tahun 2021 tersebut, BNN telah melaksanakan tugas fungsi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan capaian sebagai berikut.

Di dalam pencegahan, dimaksudkan untuk meningkatkan daya tangkal hidup dan mati, masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan prekursor narkoba melalui pembentukan 346 Desa Bersinar (Bersih Narkoba), di mana pada lokasi Desa Bersinar setelah dilakukan upaya sinergisitas antara program-program mendukung pencegahan, pelaksanaan rehabilitasi, dan pemberantasan. BNN di dalam melaksanakan program Desa Bersinar juga bersinergi dengan beberapa kementerian lembaga, seperti Kemendagri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemendes PDTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, TNI, Polri, serta *stakeholders* lainnya.

Kedua, keluarga sebagai lingkup kelompok terkecil dalam masyarakat, mempunyai peran penting dalam mencegah generasi muda menyalahgunakan narkoba. Pada tahun 2021 telah dilakukan program ketahanan keluarga terhadap 1.035 keluarga melalui pelatihan untuk meningkatkan komunikasi efektif antara orang tua dengan anak, serta mendorong anak agar melakukan aktivitas positif.

Ketiga, melalui pembentukan remaja teman sebaya antinarkoba sebanyak 1.730 remaja di 173 kabupaten kota, sebagai upaya untuk membentuk *peer educator* bagi remaja dan komunitas remaja.

Empat, generasi muda merupakan tulang punggung pembangunan, melalui pelatihan *soft skill* pada 34 SMP dan SMU sederajat diharapkan dapat membentuk karakter anak didik antinarkoba.

Melalui kegiatan advokasi dimaksudkan untuk membentuk lingkungan yang bersih narkoba, pada tahun 2021 telah dilakukan advokasi kepada 1.740 sekolah untuk menjadi sekolah bersinar dan 352 perguruan tinggi untuk menjadi kampus bersinar.

Di samping advokasi kepada lingkungan, Pendidikan, juga telah dilakukan advokasi kepada 175 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan untuk menjadi lapas dan rutan Bersinar, bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia.

Melalui program GDAD (*Grand Design Alternative Development*) di wilayah Aceh Besar, Gayo Lues, Bireuen dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat, khusus untuk menanam jagung dan kopi, yang sampai saat ini telah melibatkan 6.830 orang. Sementara telah dilakukan intervensi *life skill* kewiraswastaan pada 60 kawasan rawan narkoba, termasuk pada kawasan di mana masyarakat banyak yang membudidayakan tanaman Kratom seperti di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Dalam rangka penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba, BNN mendorong adanya peningkatan kualitas maupun sebaran layanan rehabilitasi, baik yang dikelola oleh instansi Pemerintah, komponen masyarakat, maupun pelaksanaan intervensi berbasis masyarakat IBM. Adapun klinik layanan rehabilitasi yang dikelola oleh BNN adalah 207 klinik yang bertempat di BNNP maupun BNNK seluruh Indonesia. Untuk meningkatkan aksesibilitas layanan rehabilitasi di desa dan kelurahan Bersinar maka telah dibentuk dan beroperasi 306 unit IBM.

IBM merupakan layanan rehabilitasi minimal yang dilakukan dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui agen pemulihan. BNN juga melakukan penguatan terhadap pelayanan rehabilitasi yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta, masyarakat, sebanyak 341 lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan 338 lembaga rehabilitasi milik swasta, dengan jumlah klien di balai besar, balai dan lokal rehabilitasi milik BNN sebanyak 1.511 klien, fasilitas rehabilitasi di BNN Provinsi dan BNN Kabupaten Kota sebanyak 9.779 klien, serta unit intervensi berbasis masyarakat sebanyak 2.396 klien dengan total 13.686 klien.

Dalam rangka pemberantasan dan penegakan hukum sepanjang tahun 2021, BNN telah berhasil menangani 774 kasus dengan 1.248 tersangka dan barang bukti berupa 3,3 ton sabu, 115,1 ton ganja, 191,575 butir ekstasi. Sedangkan jaringan yang terungkap sebanyak 85 jaringan, terdiri dari 24 jaringan internasional, dan 61 jaringan nasional.

Di bidang hukum, BNN ikut aktif dalam proses pembahasan antar kementerian lembaga dalam rangka revisi Undang-Undang Narkotika. Sepanjang tahun 2021 telah dilakukan penyusunan dan harmonisasi peraturan BNN, maupun peraturan Kepala BNN. Di samping itu telah dilakukan pendampingan dalam rangka penegakan gugatan perdata, tata usaha negara dari praperadilan.

Dalam rangka untuk mendorong pelaksanaan kerja sama antara BNN dengan berbagai pihak telah dilakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, BUMN, pemerintah daerah, dan swasta, di samping itu juga ikut aktif dalam forum internasional

dan regional seperti, *Asean Senior Official on Drugs Matters (ASOD)* dan *CND (Commission on Narcotics Drugs)*.

Sepanjang tahun 2021 beberapa Satgas BNN telah berhasil memperoleh penghargaan dari pihak eksternal dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas, antara lain, Pusat Laboratorium Narkotika memperoleh penghargaan dari UNODC untuk uji *proficiency quality assurance international collaborative exercise*, Anugerah Raksa Nugraha Indonesian *Consumer Protection Award (ICPA)* dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pimpinan papat dan Anggota Dewan Komisi III DPR yang saya hormati, serta hadirin sekalian,

Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 atas laporan keuangan, BNN telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian 12 kali berturut-turut. Hal ini adalah prestasi yang pantas dibanggakan dan perlu mendapatkan apresiasi karena opini WTP ini bukan merupakan hadiah dari BPK, melainkan prestasi dan kerja dari seluruh jajaran kementerian lembaga dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara.

Menindaklanjuti sejumlah temuan dari Tim BPK pada 207 BNNP dan BNNK, adanya temuan pengelolaan pemungutan PNBPN dari pelayan SKHPN, bahwa terdapat potensi pendapatan yang tidak dipungut atas pelaksanaan pelayanan SKP, SKHPN sebanyak 30.046 SKHPN dengan nilai sebesar delapan miliar sekian.

Pada tahun 2021 BNN telah melakukan penuntutan PNBPN terhadap pelayanan SKHPN tentang pagu tujuh miliar rupiah sekian, dan terealisasi sebesar sepuluh miliar sekian dari target SKHPN sebesar 25.512. Layanan untuk keperluan pilkada sebesar 10%, pelamar kerja 46%, keperluan pendidikan 33%, dan keperluan lain-lainnya 11%.

BPK merekomendasikan kepada Kepala BNN agar segera membuat kajian dan usulan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan SKHPN dengan tarif PNBPN tertentu. Tindak lanjut dari temuan BPK, meliputi, sesuai rekomendasi BPK RI telah dilakukan kajian BNN sebagai lembaga pelayanan izin SKHPN dengan tarif PNBPN tertentu. BNN melakukan penyusunan dan revisi target PNBPN secara lebih tepat dan akurat. Hal ini dilakukan dengan proses pemetaan kondisi masyarakat di wilayah masing-masing satuan kerja untuk memperkirakan jumlah permintaan yang mungkin diterima. BNN melakukan perbaikan tata kelola penerbitan SKHPN.

Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan Komisi III DPR RI yang saya hormati, serta hadirin sekalian,

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya mohon Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat dapat memberikan dukungan kepada BNN RI sehingga BNN RI mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal

dan dapat menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat di bidang penanggulangan narkotika.

lalang di pulau tumbuh merambat,
akar pepaya melilit lupa,
rapat kerja di Komisi III DPR RI penuh semangat,
untuk *war on drugs* lindungi generasi penerus bangsa,

Sekian dan teirma kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Om santi santi-santi om, *war on drugs, speed up never let up.*

KETUA RAPAT:

Baik.Terima kasih, Pak Kepala BNN.

Selanjutnya kami persilakan Kepala LPSK untuk menyampaikan langsung ke hasil pemeriksaan BPK serta tindaklanjutnya saja, Pak, karena kita sudah punya bukunya ini, biar singkat. Silakan, Pak Hasto.

KEPALA LPSK (Drs. HASTO ATMOJO SUROYO, M. Krim):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam Pancasila untuk kita semua,

Yang saya muliakan Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI,

Dan kemudian saya langsung membacakan laporan tentang keuangan LPSK pada tahun anggaran 2021.

Pimpinan dan Para Anggota Komisi III DPR RI yang kami muliakan,

Laporan Keuangan 2021 telah dilakukan audit oleh BPK, juga telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.

Situasinya agak khusus LPSK, karena ini merupakan suatu yang membanggakan buat kami, karena di tahun pertama LPSK menjadi bagian anggaran mandiri, LPSK bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan keuangan *audited* tahun 2021 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah atau SAP dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di ketentuan Pemerintah.

Realisasi belanja negara *audited* pada 2021 adalah sebesar 141 juta atau mencapai 98 miliar, atau mencapai 98,29% dari alokasi anggaran sebesar 143.500 sekian rupiah, dengan rincian sebagai berikut.

Satu, program pergerakan dan pelayanan hukum tercapai sebesar 92.636.000.000 sekian atau 98,25% dari pagu anggaran sekitar 94.490.000.000 sekian, yang terdiri atas pembayaran kompensasi sebesar 60.335.000.000., ini sebetulnya adalah anggaran... terima kasih, Pak, tadi menyitir Pak Kepala BNN, mestinya ini anggaran yang diterima, kami langsung kasihkan kepada korban.

Yang kedua, bantuan medis sebesar 2 miliar 117 rupiah, bantuan psikologis sebesar 457.376.000 , program permohonan perlindungan fisik, pendampingan hukum, dan procedural, serta program perlindungan lainnya sebesar 29 miliar sekian. Program dukungan manajemen tercapai sebesar 48–miliar 470 sekian atau 98,45% dari pagu anggaran empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu sekian juta rupiah. Dengan rincian realisasi anggaran menurut jenis belanja, yakni belanja pegawai sebesar 14 miliar sekian, belanja barang sebesar seratus dua puluh lima Sembilan ratus juta sekian. Tiga, belanja modal sebesar satu miliar seratus tiga sembilan sekian rupiah.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang kami muliakan,

Itu laporan keuangan tahun 2021 mendapatkan opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian, namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian *intern* dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran keuangan negara dan perbendaharaan.

Menurut catatan, ini terdiri atas, yang pertama, penyetoran keuangan negara sebanyak dua temuan, dengan nilai total sebesar lima miliar empat ratus dua puluh lima, lima, lima juta), tadi karena miliar terus, 5.425.000 rupiah. Ini terdiri atas kelebihan pembayaran dua paket pekerjaan dari belanja barang sebesar 3.745.000 dan sistem monitoring pelaksanaan perjalanan dinas belum memadai, dan perjalanan dinas terlambat dipertanggungjawabkan, serta kelebihan pembayaran perjalan dinas sebesar Rp1.680.000.

Temuan administrasi atau perbaikan sistem dan ... (*suara tidak jelas di rekaman 45:34*) sebanyak sembilan temuan, yakni pengendalian intern atas pelaksanaan kegiatan lembur pada LPSK belum memadai, penatausahaan belanja barang pada LPSK kurang memadai, penetapan satuan biaya dalam rangka pelaksanaan tugas perlindungan saksi dan korban pada LPSK tidak melalui persetujuan Menteri Keuangan.

Pelaksanaan adendum kontrak perpanjangan layanan internet *fiber optic international dedicated* tidak sesuai ketentuan, bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas pada LPSK tidak memadai, pengendalian atas pembayaran uang kompensasi kepada korban terorisme yang lalu belum memadai, pengelolaan persediaan belum

memadai, pengelolaan barang milik negara belum memadai dan aset tak berwujud di realisasikan menggunakan anggaran belanja barang.

Para Pimpinan dan para Anggota Dewan Komisi III yang kami hormati,

Berikut adalah langkah-langkah tindak lanjut atas rekomendasi BPK yang telah dilaksanakan oleh LPSK sejak Juni 2022.

Yang pertama, LPSK telah menyetorkan kelebihan pembayaran belanja barang ke kas negara, sebesar Rp3.745.000, untuk kelebihan pembayaran dua paket pekerjaan belanja barang dan sebesar 158.000 untuk kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas ke luar negeri yang diberikan tidak sesuai tarif SBM.

Yang kedua, LPSK telah menyusun ketentuan internal dalam bentuk memorandum kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan LPSK dan perwakilan LPSK, yang mengatur pelaksanaan kegiatan lembur, baik di hari kerja maupun hari libur, sebagai aturan untuk menentukan pelaksanaan kegiatan lembur pada kondisi-kondisi tertentu, termasuk di antaranya mekanisme presensi, bukti kehadiran, dan *ouput* kegiatan lembur.

Selain itu, LPSK juga telah menginstruksikan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK untuk memedomani, memdomani ketentuan internasional tersebut, internal tersebut, sebagai daftar pembayaran uang lembur.

Yang ketiga, LPSK telah menindaklanjuti peningkatan kualitas SDM, pengelola anggaran dan auditor di lingkungan LPSK, antara lain dengan mengirimkan beberapa pegawai dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kapabilitas Aparat Pengendalian Intern Pemerintah atau AP/IP, penilaian maturitas penyelenggaraan SPI/P, dan pelatihan perancangan, rancangan dan pengendalian kontrak pekerjaan jasa konsultasi konstruksi.

Selain itu, LPSK telah menginstruksikan kepada PPK, agar dalam penyusunan anggarannya terkait *cash plan* realisasi belanja pada DIPA dengan bagan akun standar dan keseragaman penggunaan MAK. Begitu juga pada PPSDM supaya menyimpan seluruh dokumen hak tagih dan melakukan pengecekan pembebanan tagihan, pembayaran pada mata anggaran yang sesuai.

Yang keempat, LPSK telah menyelesaikan pembahasan usulan satuan biaya-biaya masuk lainnya, atau SBMK dengan Kementerian Keuangan dan sudah terbit surat Menteri Keuangan nomor S651/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022, hal Satuan Biaya Masuk Lainnya. Pada umumnya, Menteri Keuangan menyetujui usulan LPSK mengenai satuan biaya pemulasaraan jenazah terlindung sebesar tiga juta per orang. Satuan biaya bagi perlindungan LPSK dan bantuan psikososial yang telah ditetapkan LPSK dapat mengacu pada peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan, Harga Pasar, Upah Minimum Provinsi, dan Bantuan Sosial yang Diberikan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu LPSK telah menginstruksikan kepada PPK agar lebih cermat dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Surat Menteri Keuangan tentang SBML sebagaimana telah di uraikan.

Yang kelima, LPSK telah merevisi dan memperbaiki Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas melalui Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor KEP-361/2.3.4.PPO/LPSK/06/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan LPSK, diikuti instruksi pada seluruh pejabat dan pegawai, pelaku pelaksanaan perjalanan tugas agar lebih mematuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud.

Setelah itu, LPSK telah melakukan pengembangan aplikasi layanan perkantoran berbasis laman atau *web-based*, sebagai sistem monitoring pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan agar kualitas pengawasan pada sistem keuangan dapat lebih akurat dan mudah diakses.

LPSK telah melakukan penyusunan prosedur standar pelayanan atau SOP pembayaran kompensasi dan menyusun perjanjian kerjasama dengan BNI terkait pembukaan rekening atas nama korban dan lebih berhati-hati dalam penyelenggaraan kegiatan kompensasi bagi korban tindak pidana. Selain itu, LPSK telah menginstruksikan agar pejabat perbendaharaan terkait lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya agar tidak ada lagi keterlambatan dalam pelaksanaan pembayaran kompensasi tersebut.

Yang ketujuh, LPSK telah melakukan penyusunan profil standar pelayanan atau SOP, pengelolaan, persediaan yang berlaku di lingkungan LPSK dan perwakilan LPSK.

Delapan, LPSK telah memperbaiki BAST likuidasi aset dari BA 007 ke BA 123 sesuai kondisi yang sebenarnya, mengusulkan penghapusan aset yang rusak berat kepada Dirjen KPKNL Kementerian Keuangan, dan menginstruksikan pejabat terkait agar lebih cermat dalam mencatat aset dan menggunakan klasifikasi mata anggaran yang sesuai.

Kesembilan, LPSK telah menginstruksikan PPK, agar lebih cermat dalam mengendalikan kontrak pekerjaan dan memedomani ketentuan dalam proses adedum kontrak perpanjangan layanan internet fiber optic, *international dedicated*.

Yang ke sepuluh, LPSK telah mengembangkan aplikasi SIMPELKAN, yang telah dimiliki LPSK terkait system monitoring pelaksanaan perjalanan dinas, mulai dari terbitnya surat tugas sampai dengan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, termasuk konsekuensi atas penyampaian pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang tidak tepat.

Dengan demikian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan LPSK 2021 seluruhnya telah kami tindak lanjuti.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang kami muliakan,

Demikian penjelasan kami di dalam rapat kerja ini. Sebagai penutup, kami mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian dan ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami membuka, membuka diri atas kritik, saran, dan masukan yang produktif agar LPSK tetap berubah lebih baik.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selanjutnya kami persilakan....

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Izin, Ketua. Saya melihat di bahan rapat ini ada yang keliru ya. Kalau kita lihat, Bapak-Ibu, teman-teman sekalian, ini *kan* diambil dari LKPP ya, Pemerintah. Yang Komisi Yudisial, ini uraiannya, Bapak-Ibu bisa cek ini di halaman 33. Ini punya MK, tapi ini kesalahan bukan ada di Sekretariat kita.

Ini jadi... kalau nanti nanggungpin Komisi Yudisial saja. Di halaman 33 dari ini yang disampaikan.

Itu *aja*, Pak Ketua. Saya kira untuk atensi kita, supaya nanti kita *enggak, enggak* keliru nanya juga sama Komisi Yudisial, karena basisnya ini. Makasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Arsul, terima kasih.

Selanjutnya, kami persilakan Ketua Komnas HAM. Langsung masuk ke hasil pemeriksaan serta tindak lanjut BPK aja, Pak, biar singkat.

KETUA KOMNAS HAM (DRS. AHMAD TAUFAN DAMANIK, M.A.):

Makasih, Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, para Pimpinan, dan jajaran Komisi, Komnas Perempuan, BNPT, LPSK, dan BNN, serta KY,

Saya kira saya akan masuk yang seperti yang diperintahkan Pimpinan tadi, tapi saya ingin sampaikan anggaran kami 2021 totalnya Rp1.606.095.000,00. Itu tujuh puluhan miliar anggarannya Komnas HAM, dua puluhan miliar itu anggarannya Komnas Perempuan. Nanti Komnas Perempuan akan sampaikan sendiri yang lebih detail tentang mereka.

Nah, dari realisasi belanja tahun 2021 itu realisasinya 96,02%. Tentu saja ini ada masalah karena kaitan dengan Covid, Pak, untuk realisasinya.

Saya akan langsung untuk laporan BPK. Laporan BPK 2021, Komnas HAM kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Dari Ibu Menteri Keuangan juga kita diberikan nilai sangat memuaskan, tetapi memang ada beberapa catatan, yang ini kami sampaikan di sini. Itu soal yang pertama adalah pengamanan atas aset. Jadi, ada dua aset yang dicatat oleh BPK temuan-temuan.

Pertama, soal sepeda motor di kantor perwakilan Komnas HAM Papua. Sudah ada penyelesaiannya, Pak. Ini ada surat tanda terima laporan tindak apa... tindak pidana pencurian di Kepolisian Polda Papua. Dan untuk itu juga sebetulnya kesekjenan sudah memberikan sanksi kepada yang bersangkutan untuk dia... apa, surat tanggung jawab mutlak dari yang bersangkutan dan sudah mulai mencicil, meskipun sebetulnya ini dia terjadi pada saat dia melakukan pekerjaan.

Yang kedua, laptop. Sama juga ya, ini temuan yang dikeluarkan oleh BPK.

Kemudian, sisi lain juga ada sistem pengendalian intern atas penatausahaan *voucher* bahan bakar minyak BBM yang masih lemah. Itu dicatat oleh BPK dan kemudian habis itu Sekjen Komnas HAM telah menginstruksikan kepada Sub Koordinator Bidang Rumah Tangga agar lebih optimal, melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan kupon BBM, Pak. Di gudang menggunakan kupon ini ada pengadministrasiannya yang kurang baik, tapi sudah di upayakan perbaikan.

Kami kembali mendapat WTP dari BPK, dan tentu saja hasil perbaikan-perbaikan yang selama ini. Kalau kita ingat, misalnya pada periode kami mulai menjabat di akhir 2017, kami sebelumnya sudah kena *disclaimer* dua kali, Pak. Jadi tahun pertama kami itu *alhamdulillah* dapat WDP dan setelah itu sampai hari ini kita mendapatkan WTP serta predikat sangat memuaskan dari Menteri Keuangan. Tetapi, ini kalau kita buat catatannya, masih ada rekomendasi, Pak, beberapa persen, dari 259 rekomendasi baru 230, Pak. Bukan baru, saya kira, tapi sudah, dan ini sebagian besar adalah rekomendasi yang dulu, Pak, periode lalu.

Jadi, kami memang harus menanggung risiko periode yang dari lalu, pertama, dua tahun yang *disclaimer* sebelum periode kami. Belum sesuai rekomendasi itu 22, rekomendasi di 8,4%, rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 7 rekomendasi, tapi ada komitmen kami bersama BPK, BPK tidak saja akan memeriksa, tapi akan

seterusnya mensupervisi Komnas HAM. Itu kesepakatan yang sudah diberikan selama ini.

Saya kira sebelum saya mengakhiri, Pak, saya mohon izin untuk menghadap Pak...Pak Ketua, ada dua laporan yang ingin saya sampaikan.

Pertama, laporan tahunan kami, secara simbolik itu saya sampaikan. Yang kedua, ini sangat penting, Pak, adalah Laporan Panitia Seleksi Calon Komisioner Komnas HAM 2022-2027. Sudah disampaikan kemarin secara resmi melalui surat dan sekarang ingin saya sampaikan secara langsung kepada Pimpinan secara simbolis.

(Ketua Komnas HAM menyampaikan laporan kepada Pimpinan)

Terima kasih, Pak, sekaligus saya kira sebagai... secara pribadi juga mungkin saya ingin menyampaikan terima kasih ya pada seluruh Pimpinan Komisi III dan Anggota, karena saya termasuk yang tidak mencalonkan diri, Pak.

Jadi, mungkin ini sekaligus apa... pamitan saya kepada Bapak-Ibu semua, terima kasih atas dukungannya selama ini, lima tahun saya menjadi Ketua Komnas HAM.

Sekarang saya persilakan mungkin, mohon izin, Pak, Komnas Perempuan untuk menyampaikan bagian khusus dari keuangan mereka.

KETUA KOMNAS PEREMPUAN (ANDY YENTRIYANI):

Terima kasih, yang terhormat Ketua Komnas HAM.

Yang saya hormati Pimpinan dan juga Anggota Komisi III, Pimpinan BNPT, LPSK, dan juga Komisi Yudisial, dan juga Anggota dari Komnas HAM,

Salam sehat,
Salam nusantara Bhineka untuk kita semuanya.

Ini Laporan Komnas Perempuan adalah pelengkap dari Laporan Komnas HAM, karena sekretariat kami bersama dengan Sekretariat Komnas HAM.

Sebagaimana diketahui, tugas dari Komnas Perempuan terutama di dalam Perpres ada lima, pendidikan publik, pemantauan, pencarian fakta dan pendokumentasian, kajian dan perekomendasi untuk perubahan kebijakan, serta kerja sama.

Laporan tahunan kami sudah kami sampaikan pada saat RDP 9 Maret lalu waktu itu, tidak akan saya ulangi, dan saya langsung saja ke bagian penyerapan 2021.

Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua Komnas HAM, anggaran dari Komnas Perempuan pada tahun 2021 adalah sebesar 21,3 miliar, dan sebetulnya kalau dihitung, ini sebetulnya merupakan penurunan dari dukungan APBN pada Komnas Perempuan dibandingkan dari tahun 2020, penurunannya sebesar 5%.

ANGGOTA KOMISI III:

Interupsi, Pimpinan.

KETUA KOMNAS PEREMPUAN (ANDY YENTRIYANI):

Saya akan langsung ke penyerapan juga, Pak, saya hanya menyampaikan....

KETUA RAPAT:

Baik, silakan.
Sebentar, Ibu. Iya.

Ibu, silakan.

KETUA KOMNAS PEREMPUAN (ANDY YENTRIYANI):

Yang kedua adalah....

KETUA RAPAT:

Ibu, sebentar, ada yang interupsi.

Silakan, Bu.

ANGGOTA KOMISI III:

Izin, Pimpinan. Untuk bahan pemaparan dari Komnas Perempuan belum kami terima.

KETUA KOMNAS PEREMPUAN (ANDY YENTRIYANI):

Betul, karena tadinya kami pikir ini hanya gabungan dari Komnas HAM, karena tidak ada sebetulnya temuan BPK secara khusus. Mungkin paparan ini sebetulnya juga telah disampaikan pada tanggal 9 Maret, eh, 9 Juni yang lalu, cuma tidak dielaborasi. Jadi, karena itu kami tidak melakukan pengandaan.

KETUA RAPAT:

Include dengan Komnas HAM ya, Bu, ya?

KETUA KOMNAS PEREMPUAN (ANDY YENTRIYANI):

Tapi kita bisa susulkan.

ANGGOTA KOMISI III:

Oke, kami perlu diberikan kembali.

KETUA KOMNAS PEREMPUAN (ANDY YENTRIYANI):

Baik.

ANGGOTA KOMISI III:

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Lanjut, silakan.

KETUA KOMNAS PEREMPUAN (ANDY YENTRIYANI):

Baik. Dari program ini, 9,1, dari total 21 M sekian, 9,1-nya adalah untuk program, dan untuk pelaksanaan program sebetulnya Komnas Perempuan...

KETUA RAPAT:

Lanjut...lanjut, Bu.

KETUA KOMNAS PEREMPUAN (ANDY YENTRIYANI):

Karena anggaran programnya hanya 9,1 M untuk keseluruhan tersebut tidak memadai, maka kami melakukan upaya permohonan dana hibah dan nilai dana hibah itu sebesar empat koma sekian M. Artinya, ketergantungan program Komnas Perempuan pada dana hibah adalah mencapai 49 M atau setengah dari program dari Kementerian Keuangan ini.

Atas dana ini, penyerapan kami sekitar 96,1 dan seperti yang disampaikan oleh Ketua Komnas HAM, kendala utama kami adalah terkait dengan kondisi Covid-19. Kita ingat, ada tantangan Delta di sekian tahun dan itu menyulitkan, karena sejumlah urusan Komnas Perempuan mengalami situasi yang tidak memungkinkan berkumpul di tahun 2021 serta juga mengurangi biaya operasional, karena Komnas Perempuan mengoptimalkan kerja dari rumah, mengingat ruangan kerja kami memang sangat terbatas dan tidak mungkin untuk digunakan 50-50. Sampai sekarang, biaya renovasi Gedung Pola lantai 6, yang merupakan ruang kerja tambahan dari Komnas Perempuan itu belum pernah tersedia.

Namun demikian, penyerapan ini merupakan peningkatan 5% dari penyerapan tahun 2020. Dan ini dimungkinkan karena koordinasi Komnas Perempuan secara internal maupun bersama dengan Sekretariat dari Komnas HAM itu semakin menguat. Dan koordinasi ini pula yang memungkinkan Komnas Perempuan tidak memiliki catatan khusus oleh BPK pada tahun 2021 ini.

Ke depan, tentunya kami akan mengupayakan kerja baik ini terus dipertahankan dan ditingkatkan, apalagi di tengah tumbuhnya harapan yang begitu besar pada kerja Komnas Perempuan.

Patut kami sampaikan pada Pimpinan dan Anggota Komisi III, dengan mohon hormat, pada tahun 2021 laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan di Komnas Perempuan itu naik 80% dibandingkan tahun 2020 dan permohonan informasi juga meningkat lebih 70%.

Dengan kondisi pendanaan, daya penyerapan, serta tantangan terkait kompleksitas kasus kekerasan terhadap perempuan, kami sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Komisi III untuk penambahan APBN 2023, sebagaimana yang kita diskusikan pada bulan Juni lalu. Meskipun sampai hari ini belum ada informasi soal realisasinya, apakah kita ditambahkan atau tidak.

Itu saja yang mau saya sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III yang terhormat. Terima kasih atas kesempatannya dan juga dukungan bagi Komnas Perempuan.

Selamat siang,
Salam sehat,
Salam nusantara bhineka untuk kita semua,

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih, Ibu.

Selanjutnya kami persilakan yang terakhir Sekjen KY, langsung ke hasil pemeriksaan dulu. Silakan.

SEKJEN KOMISI YUDISIAL:

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI,
Yang terhormat Kepala BNPT, BNN, Ketua Komnas Ham Komnas Perempuan, dan
Kepala LPSK**

Perkenalkan kami menyampaikan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Komisi Yudisial tahun 2021, Semester I dan Semester II. Kami, Komisi Yudisial juga

seperti halnya rekan-rekan lain mendapatkan peredikat wajar tanpa pengecualian juga untuk tahun 2021 ini.

Ada beberapa temuan dari BPK, yang pertama, terkait dengan belanja pegawai, kepada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah sebesar 87 (delapan puluh tujuh) juta, sudah kami tindaklanjuti dengan melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal nomor 57 Tahun 2022 perihal Instruksi tindak lanjut BPK, yang ditujukan kepada Kabag Kepatuhan Internal, Kasubag TU dan Kepegawaian, serta Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, dan kepada yang bersangkutan telah diberhentikan dengan format tidak atas permintaan sendiri berdasarkan SK Sekjen nomor 109 Tahun 2022.

Temuan yang berikutnya adalah kelebihan pembayaran atas pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja pada kontrak manajemen *building*. Telah diselesaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 49 tanggal 11 Juli Tahun 2022.

Kemudian kami juga mendapatkan surat dari BPJS Nomor 18542, 5 Agustus 2022 menyatakan bahwa Komisi Yudisial sudah tidak tunggakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan.

Selanjutnya adalah kekurangan volume pada tiga Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar 20 juta sekian, dan telah diselesaikan melalui sesuai dengan rekomendasi BPK melalui nota dinas Sekjen Nomor 50, tanggal 11 Juli 2022, perihal instruksi atas tindak lanjut rekomendasi BPK yang ditujukan kepada PPK selaku Biro Umum, dan Tim Pemeriksa atau Penerima Barang Jasa Komisi Yudisial, dan telah pula ditindaklanjuti penyempurnaan ke Kas Negara dengan NTPN Nomor 3EF30 dan seterusnya sebesar Rp4.573.300,00 kemudian sebesar Rp7.513.000 sekian, dan yang ketiga setorannya Rp.8.640.000,00

Selanjutnya temuan adalah pembayaran biaya transport lokal kegiatan survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Penghubung KY di dua belas wilayah kantor penghubung KY sebesar Rp69.000.000,00 tidak tepat, dan telah ditindaklanjuti dengan nota dinas Sekjen KY yang Nomor 52 11 Juli 2022 tentang instruksi atas tindak lanjut rekomendasi BPK yang ditujukan kepada PPK I Biro Umum.

Temuan berikutnya adalah pembayaran uang saku kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor TA 2021, belum dilakukan pemotongan PPH sebesar... PPH Pasal 21. Telah ditindaklanjuti dengan nodis Sekjen Nomor 51, 11 Juli 2022 dan bendahara sedang melakukan pemetaan terkait kegiatan program meeting yang dikenakan PPH Pasal 21, untuk selanjutnya akan di laksanakan sesuai arahan atau rekomendasi dari BPK.

Selanjutnya yang keenam, pertanggungjawaban kegiatan rapat atau pertemuan di luar kota dengan menggunakan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas biasa tidak tepat. Menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, Sekjen KY telah menerbitkan

nodis 11 Juni 2022, perihal instruksi atas tindak lanjut rekomendasi BPK yang ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dan Pejabat Pembuat Komitmen 1 sampai dengan 6, dan ini telah ditindaklanjuti dengan melakukan revisi anggaran sesuai dengan peruntukan dan kaidah yang berlaku untuk sisa anggaran tahun 2021 dan tahun 2022.

Ke tujuh, ketidakcermatan di dalam melakukan pembayaran atas pekerjaan pengadaan peralatan dan mesin penanganan pandemi Covid-19, berupa *air purifier* tahun anggaran 2021 sebesar Rp12.600.000,00.

Sesuai dengan rekomendasi BPK, kami telah menerbitkan nodis Nomor 54, tanggal 11 Juni 2022, yang mengintruksikan untuk meninindaklanjuti kepada seluruh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran dan telah dilakukan pembayaran ke kas negara melalui bukti setor NTPN Nomor 800431 dan seterusnya sebesar Rp12.600.000,00.

Temuan berikutnya, pengelolaan persediaan, barang persediaan belum memadai. Sebagai tindak lanjut, kami telah memerintahkan kepada Sub Bagian Perlengkapan dan pengurus barang persediaan untuk melakukan pengelolaan atas barang secara berkala, termasuk untuk melakukan inventarisasi dan pengusulan penghapusan atas ketersediaan yang kadaluarsa.

Sudah diterbitkan juga nodis Nomor 144 tanggal 1 Agustus 2022 tentang penghapusan barang milik negara pada kantor Komisi Yudisial sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan barang persediaan.

Yang terakhir, penataan aset tetap belum tertib. Sesuai dengan rekomendasi BPK, kami telah memerintahkan kepada penanggung... pejabat penanggung jawab untuk melanjutkan inventarisasi aset BMN. Selanjutnya... dan selanjutnya sudah dilakukan inventarisasi hasil, DIR-nya dilampirkan di dalam (01:13:28 rekaman tidak jelas), sehingga data inventarisasi juga sinkron dengan aplikasi SAKTI dan sudah dilakukan pemutahiran DIR sesuai ruangan.

Tindak lanjut berikutnya adalah pengelolaan BMN akan melanjutkan aktivitas tersebut sampai ~~sat~~ akhir tahun sesuai *action plan* yang sudah dilaporkan kepada BPK dan telah diterbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 144 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada kantor Komisi Yudisial tanggal 1 Agustus 2022 dan juga telah diterbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penetapan ... (*suara tidak jelas rekaman 1:13:59*) dan ruangan pada kantor Komisi Yudisial.

Demikian beberapa temuan dari BPK yang sudah semuanya kami tindaklanjuti, dan kami akhiri dengan pantun juga seperti Bapak-Bapak sebelumnya.

jalan-jalan ke kota Tegal,
rumah indah tempat bermukim,

bersama DPR dan Komisi Yudisial menjaga integritas hakim.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih, Pak.

Pimpinan dan Anggota yang kami hormati,

Setelah mendengarkan penjelasan dari mitra kerja, saya persilakan kepada Anggota Komisi III untuk melakukan pendalaman. Perlu kami ingatkan bahwa saat ini sedang dalam pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2021 dan penjelasan tindak lanjut atas hasil pemeriksa semester I dan II BPK tahun anggaran tahun 2021.

Untuk itu, dipersilakan kepada kawan-kawan untuk melakukan pendalaman. Kita kiri-kanan aja ya. Baik. Pak Ichsan dulu katanya. Dia pegang mick soalnya.

Silakan, Pak Ichsan.

F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan, rekan-rekan Komisi III, Kepala BNN, Komnas HAM, LPSK, BNPT, Komnas Perempuan, dan Komisi Yudisial, beserta jajarannya,

Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Pada prinsipnya kami tentunya bangga, bahwa mitra-mitra kami ini semua mendapat WTP pada prinsipnya. Tetapi, menarik di sini. Komisi Yudisial mendapat... saya mulai dari sana *aja*, karena ini terakhir, kebetulan duduk disini, Pak. Jadi, mendapat WTP, tetapi catatannya banyak sekali, Pak. Catatannya banyak sekali dan semua kelebihan pembayaran. Kebanyakan kelebihan pembayaran ataupun misadministrasi di dalam pengelolaan anggaran... apa namanya... perjalanan dinas ataupun ada orang yang sudah sekian lama tidak masuk ya, tetapi masih dibayarkan gaji. Ya kan? Dan juga dalam pengelolaan...

Apalagi ini, Pak, poin kesembilan. Ini ada penatausahaan aset tetap belum tertib. Ini sampai sekian banyak ini. Artinya, catatan dari BPK, tetapi ya alhamdulillah kalau KY masih dapat WTP. Ya, tentunya karena ini dapat WTP, ya, kami tidak bisa terlalu

banyak menanyakan, karena memang yang membaca keuangannya adalah BPK. *Kan* begitu? Tapi, hanya menjadi catatan, nanti mudah-mudahan pada yang tahun yang akan datang, tidak lagi ada hal-hal seperti itu, Pak. Artinya, kalau WTP, ya tentunya kesalahan masih ada, tetapi jangan terlalu banyak seperti ini. *Gitu*, Pak, tapi kita juga akan lebih bangga dan atas hasil WTP-nya, *gitu*, Pak.

Kemudian, bagaimana dengan Komnas HAM? Ya, ini bagaimana, anggaran cuma seratus miliar suruh menangani Sambo, *gitu*, Pak, ya. Jadi, ya... ya kita pada prinsipnya mendukung ya. Kembali lagi, ini *kan* juga WTP, yang juga tidak terlalu banyak catatannya.

Nah, cuma saya hanya tadi, ingin menanyakan kepada Komnas Perempuan. Itu kalau dana hibah itu dari mana, *gitu* ya, apakah dari APBN atau dari luar negeri? Karena ini *kan*... terus masuknya apakah lewat Komnas HAM atau rekening... apa Komnas Perempuan memiliki apa namanya... rekening tersendiri ataupun.... Kalau dia memiliki rekening sendiri *kan* *enggak* boleh berada di dalam, artinya Komnas HAM. *Nah*, ini menarik untuk hanya detail sedikitlah, supaya kita memperkaya wawasan kita.

LPSK juga, bagaimana ya, 141 miliar. Saya kira, mungkin akan datang, dalam hal ini mohon ada di sini, *safe house* di mana, Pak, ya, ini ada 29 miliar kalau *enggak* salah ya, ya dalam rangka... apa... program permohonan perlindungan fisik, pendampingan hukum, dan lain-lain mungkin *safe house* ada di masuk di situ ya.

Nah, dalam hal ini menindaklanjuti pertemuan Bapak kemarin apa... beberapa hari yang lalu, Pak, ya, bahwa ada permintaan anggaran untuk pembangunan *safe house*-lah, tapi mungkin disebutnya jangan rumah tahanan, Pak. Lebih baik *safe house* juga, karena Bapak dikenal sebagai nomenklaturnya *safe house*, Pak, yang Bapak sampaikan.

Iya betul, betul sebetulnya. Jadi, apa namanya... ya, kami juga, ya, semetara Bapak WTP dan penggunaan Bapak, anggaran Bapak cukup baik, 90, penyerapannya 97,29%, ya kami bersyukur juga bahwa semua dalam keadaan baik-baik, *gitu*.

Dan untuk... apa namanya dan untuk BNN, Pak Kepala BNN. Pada prinsipnya kami mendukung penuhlah, Pak, program Bapak tentang pemberdayaan masyarakat ini. Karena... apa namanya, tentu daripada masyarakat menanam hal-hal yang tidak baik, lebih baik diarahkan untuk menanam yang positif ini. Tapi, dalam program Bapak ini, sebetulnya kami juga mau melihat, Pak, apa dalam laporan ini, mungkin nanti di... di laporan kebutuhan, kebutuhan anggaran Bapak untuk di 2023, karena dalam rangka program... dalam rangka revisi Undang-Undang Narkoba nanti, Pak, itu *kan*, kita ~~kan~~ stresingnya banyak nanti ke arah rehabilitasi, Pak.

Nah, rehab ini *kan* biayanya mahal sekali, Pak, karena di sini bab... dalam laporan di sini, Bapak telah menghasilkan, merehab sekian ribu, sekian ribu. Banyak sekali, Pak. *Nah*, *enggak* kelihatan anggarannya berapa yang di-*spend* di dalam... di tahun 2021 ini. Ya, jadi juga nanti... apa namanya, tentang Desa Bersinar, Sekolah

Bersinar, ini suatu program yang baik, Pak. Hanya sekarang *kan* kita punya tujuh puluh ribu sekian desa, Pak. Bapak di sini baru sampai 340 berapa ya, Pak, ya? Kapan selesainya? Ini yang menjadi pertanyaan, yang menjadi *concern*, Pak.

Programnya baik, cuma hanya setahun. Ingin tahu... apa ... pencapaian atau penyelesaian atas sekian desa, karena tujuan kita tentu sekian banyak desa ini *tercover* semua atau.... *Nah*, dalam hal ini bagaimana juga menentukan desanya yang Bapak pilih ini, tiga ratus sekian ini, apa namanya... penentuannya kenapa desa itu di... apa namanya... dipilih untuk masuk dalam Desa Bersinar? Ini hanya sebagai... apa namanya... pengetahuan kita, sebagai mitra Bapak, supaya kita mengerti apanya program-program yang ada di tempat Bapak. Pada prinsipnya ya, karena ini WTP juga ya kita harus, kita juga berbangga juga ke depan.

Dan untuk BNPT ya...? Ini Bapak punya akuntan hebat sekali, Pak. Penyerapan Bapak itu *almost exact*, *almost exact* semuanya, Pak, sampai sembilan puluh sembilan koma sekian, 99% sekian. Tentu menarik sekali, apalagi banyak program-program yang... semacam deradikalisasi, *kan* susah dihitung tentunya biaya-biaya *begituan*, Pak. Jadi, saya kira, ya, karena mitra kita dan kita mensyukuri memberikan apresiasi juga bahwa penyerapan Bapak ini sangat baik dan sangat akurat, karena kita *kan* anggaran kita berbasis kinerja, Pak. Jadi, tentu baik, bagus sekali.

Hanya sekarang, di sini ada juga pertanggung jawa yang pekerjaan atas pemeliharaan ini, Pak, yang uangnya baru dikembalikan 48, 40 an juta, Pak. Jadi, berarti masih ada indikasi kerugian negara 202 juta, Pak. Baru dikembalikan 40 juta sekian-sekian sehingga masih ada sebetulnya kekurangan 162 juta, kalau melihat catatan ini, Pak, ya.

Nah, itu mungkin, kalau bisa dalam waktu secepatnya agar diselesaikan. Kami pasti menggantunglah, Pak, istilahnya, kalau saya bilang penyelesaian ini.

Saya kira mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Pimpinan. Lebih kurangnya saya mohon maaf.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih, Pak Ichsan. Sebelah kiri, Pak Arsul.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat para Pimpinan dari mitra kita, Pak Sekjen KY, Pak Kepala BNN, Ketua Komnas HAM, Ketua LPSK, Kepala BNPT, dan Ketua Komnas Perempuan, Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi III yang mengikuti rapat ini, baik secara luring maupun secara daring,

Sama dengan Pak Ichsan, saya kira. Saya juga ikut berbangga bahwa seluruh mitra Komisi III, ada 14 mitra Komisi III ini, LKPP-nya semua WTP. *Nah*, ini bukan hanya tahun ini saja. Kalau ditarik ke belakang, rata-rata dari 2017, kecuali Komnas HAM di 2017 WDP dari sebelumnya TMP (Tidak Menyatakan Pendapat).

KPK pernah turun pangkat dari WTP di 2017 menjadi WDP di tahun 2018, tapi yang lain semua dari 2017 sampai 2021 ini WTP semua. Tentu harus kita syukuri itu. *Nah*, saya sama juga dengan Pak Ichsan, ingin memulai dari Komisi Yudisial.

Saya terus terang agak heran juga, Pak, Bapak bisa dapat WTP dengan catatan. Saya ingin bandingkan dua, berarti auditor BPK yang mengaudit apa... KY ini, *soft* ini, Pak, sama Bapak, dibandingkan dengan auditor apa... BPK, yang mengaudit Komnas HAM di tahun 2015, 2016. Itu urusan kecil-kecil, saya inget itu, karena saya sudah periode lalu sudah jadi anggota DPR ya, urusan uang makan, perjalanan dinas 150 ribu bla bla bla itu membuat ya, memang ada kasus 125.000.000, menyangkut salah satu komisioner pada saat itu ya, tapi itu membuat laporan keuangannya Komnas HAM waktu itu TMP, *at first*, Tidak Menyatakan Pendapat, ya, itu.

Nah, jadi ini, Pak Sekjen, maksud saya, yang dipesankan Pak Ichsan tadi memang harus, ya, saya kira menjadi perhatian benar. *Nah*, saya mohon penjelasan, karena ini keheranan yang kedua ya. Dari LKPP yang apa... saya terima, tentu dari BPK, Komisi Yudisial ini *kan* menetapkan juga sasaran strategis dengan tiga indikator kinerja ya. *Nah*, apa... dari tiga indikator kinerja tersebut, satu indikator kinerja praktis sepertiganya luar biasa apa... capaiannya melebihi target. Tapi, dua indikator kinerja belum ditetapkan capaian kerjanya, tapi sudah mendapatkan WTP.

Ini kita harus tanya juga sama auditornya ini, kepada BPK ini, gitu ya itu. *Nah*, kenapa *kok* bisa, *gitu loh*. Ini penting, tapi barangkali Pak Sekjen bisa menjelaskan kepada kita di sini ya, kenapa *kok* bisa seperti ini.

Yang lain, ini, Pak Boy, terima kasih, karena berkat data Bapak empiris dari BNPT, Doktor saya selesai juga, Pak Boy, di luar negeri ya, setelah terkatung-terkatung sepuluh tahun. Sebab, sekarang bahaya di Komisi III kalau *enggak* jadi doktor ya. Ya *kan*, *gitu*. *Nah*, jadi... jadi. Saya terima kasih, Pak, ya, karena wawancara dengan Bapak dan Pak Brigjen Ahmad Nurwahid, itu apa... selesai juga, dan.... (*suara tidak jelas 1:28:28*) Pak Petrus Goris juga saya bahas juga tuh besok, pasti saya, tapi saya kritisi, Pak, itu.

Nah, ini untuk BNPT, Pak. Ada 13 sasaran strategis dengan 16 indikator kinerja. Tiga indikator kinerja melebihi target, 9 memenuhi target, dan 4 belum memenuhi target. *Nah*, saya mohon penjelasan ini. BNN ada 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja, 1 melebihi target untuk kita apresiasi, dan 1 apa... kurang memenuhi target. Ini mohon penjelasan juga.

Nah, memang kalau Bapak-Bapak dan Ibu pihak, kami sekarang di DPR ini memisahkan antara pembahasan anggaran yang akan datang dengan apa... rapat perhitungan anggarannya intinya. Ini supaya apa... bagi kami di DPR juga akuntabilitas DPR dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya di bidang apa... *budget*, anggaran itu juga lebih baik lagi, menjadi lebih akuntabel.

Nah, dari pembahasan ini saya kira itu yang akan menjadi dasar bagi apa... teman-teman, kami semua di sini untuk juga selain menyetujui, tapi kalau ada ruang fiskalnya juga memperjuangkan, karena Bapak-Bapak pasti akan mengajukan tambahan anggaran. Lihat ini.

Saya kira itu saja dari saya, Ketua. Kalau Komnas HAM ya ada... (*suara tidak jelas rekaman 1:30:19*), tapi memang patut kita puji apa... komisioner periode ini ya, tapi jangan GR dulu juga yang mau jadi apa... apa... komisioner periode kedua, *gitu*. Pertanyaannya pasti lebih berat itu nanti.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Sebelah kiri ada yang ingin ditanyakan? Sebelah kanan? Silakan, Mas Heru.

F-PKB (HERU WIDODO, S. Psi.):

Makasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III yang hadir,
Yang saya hormati Kepala BNPT, Kepala BNN, Komnas HAM, demikian Sekjen KY,**

Pertama, tentu saya ingin menyampaikan terkait dengan temuan BPK yang telah, apa aamanya... pemeriksa semua lembaga yang di depan, bahwa saya kira BPK sudah memiliki rekomendasi, saya baca semuanya, semua memiliki rekomendasi yang kira-kira harus dilaksanakan, ditindaklanjuti, saya kira tinggal nanti masing lembaga menyelesaikan itu.

Kemudian yang kedua, ini untuk BNPT. BNPT ini saya melihat bahwa program pencegahan ini saya kira menarik sekali dan itu menjadi titik focus. Dan saya kira ke depan, karena memang saya berpikir bahwa hari ini atau selama ini tidak terjadi aksi terorisme secara nyata, mungkin karena memang keberhasilan dari program pencegahan, saya kira itu.

Ini juga perlu ditingkatkan programnya dan itu difokuskan di sana. Ini kalau tidak salah anggarannya 95,1 miliar, saya kira ini juga perlu menjadi perhatian serius bagi kita semua, Pak Ketua dan begitu juga dari fraksi yang lain, bahwa penguatan-penguatan terhadap program yang... apa namanya... dirancang atau disusun oleh BNPT ini perlu kita dapat dukungan secara penuh.

Kemudian selanjutnya, BNN, ini juga tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ichsan, dari 70.000 sekian ya, kalau *gak* salah ya, Pak, ya, mengenai desa tadi. Jadi, baru 346 ada Desa Bersinar. Saya kira ini juga perlu, Pak, karena sekarang narkoba ini bukan di kota *aja*, sudah mulai masuk desa-desa. Jadi, saya kira ini juga perlu menjadi perhatian bagi kita semua dalam hal peningkatan anggaran BNN. Dan, ini yang paling menarik adalah mulai kemudian programnya merambah ke sekolah, kemudian ada lagi *nih* terkait dengan rehabilitasi, juga banyak sekali. Saya kira ini perlu dukungan yang serius bagi kita semua dan Komisi III dan dari fraksi-fraksi dalam hal penguatan pencegahan penanggulangan narkotika.

Kemudian, selanjutnya, yang paling menarik adalah LPSK, karena hari ini LPSK sedang menjadi gadis seksi ya, karena apa namanya... menangani kasus Duren Tiga. Sama hal, seperti hal yang kemarin saya tanyakan, soal SDM, lalu kemudian soal fasilitas. ketika ada korban atau saksi yang kemudian mengajukan perlindungan, seperti misalnya kemaren Bharada E, misalnya, apakah dari sisi keamanan, lalu kemudian dari sisi yang lain sudah bisa menjamin itu? Maka kemarin teman-teman Komisi III ketika kita ada rapat dengar pendapat, kita menanyakan, apakah LPSK dengan PD berani menjamin soal keselamatan Bharada E, karena ini kaitannya dengan kemampuan, lalu kaitannya dengan apa namanya... fasilitas dan sebagainya.

Saya kira itu, Pimpinan. Jadi, apa aamanya... kita sama-sama berharap bahwa Komisi III dan fraksi-fraksi yang lain sama-sama menunjukkan dukungan hal, dalam hal anggaran kepada seluruh mitra kerja kita. Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamt thariq,
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,*

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Heru. Selanjutnya sebelah kiri *enggak* ada? Oh, silakan, Puang.

F-PDIP (Drs. H. SAFARUDDIN):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

Selamat pagi atau selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati Ketua dan Bapak-Bapak dari mitra,

Ada beberapa hal yang mungkin perlu penjelasan dari... pertama. dari BNPT. Itu, Pak, masalah programnya penanggulangan teroris kerja sama internasional. Saya melihat 16 M lebih, begitu. Apa sebetulnya yang... *output* dan *outcome*-nya ini. Pak? Kerjasama... ini *kan* 16 M itu *kan* kalau untuk digunakan melakukan apa... deradikalisasi di dalam negeri *kan* mungkin bisa lebih efektif, tapi *kan* kalau memang dari luar negeri memang kerjasama internasional ini bisa lebih manfaatnya juga, mohon penjelasan ini, kira-kira untuk apa itu, Pak?

Untuk BNPT, BNN. BNN, Pak. Saya tertarik itu masalah... ini soalnya di Kaltim ini, di Kaltim, Pak, yang pemberdayaan masyarakat. Kalau saya lihat di Kalimantan Timur itu pengelolaan ikan menjadi abon, nugget itu *kan* ada 40 orang ya. Kalau bisa dikembangkan, saya mau tanya hasilnya seperti apa sekarang, Pak? Yang di... di desa, di Kutai Kartanegara, di Kota Bangun seperti apa? Ya, mudah-mudahan bisa dikembangkan di daerah lain juga, *gitu*.

Nah, kenapa di... kenapa di desa Liang Ulu, kenapa di Kota Bangun, Pak? Padahal sebetulnya *kan* di Samarinda, Balikpapan itu yang mungkin banyak yang... yang... yang perlu diberdayakan, karena beredarnya narkoba itu *kan* di Samarinda, Kukar, Balikpapan itu.

Nah, ini *kan* sebetulnya saya senang juga kalau bisa seperti ini, karena bisa menjadi UMKM kita. Nah, ini, UMKM ini, Pak, tapi saya lihat enggak kerjasama dengan Kementerian itu, Pak, ya. Mungkin kalau kerjasama dengan Kementerian bisa *online*. Jadi, pemasarannya itu jelas ke mana. Kita ajarin untuk semua itu, di... di... apa... pemasarannya itu bisa *online*, lebih... lebih jadi jelas pemasarannya nanti.

Ini saya tertarik juga ini, kalau ada... nanti saya mau ikut juga, Pak. Ikut untuk mengembangkan teman-teman kita di sana, ~~ya~~ terutama di berapa tempat itu memang rawan untuk narkoba, Pak, untuk di Samarinda maupun Balikpapan. Orang-orang susah, Pak, orang-orang susah memang di situ. Jadi, yang paling gampang dia jual narkoba. Mungkin ada beberapa tempat mungkin di Samarinda. Tapi, kalau ini bisa berhasil *kan* bagus, Pak. Saya mau juga nanti ikut *di situ*, bagaimana memantau, *gitu*, Pak.

Kemudian, ini, Pak Kepala BNN, ini banyak *nih* tangkapan ini, berapa ton ini, sudah 85 jaringan untuk 2021. Luar biasa. Pak, ini sabu, sabu 3,3, ganja, ekstasi 191 ribu.

Yang saya tanyakan, pengaman barang bukti ini seperti apa, Pak, ya. Jangan sampai bocor pula lagi. Kita tangkap, tahu-tahu bocor ke luar. Mohon penjelasan ini atau mungkin langsung dimusnakan mungkin, Pak. Dari BNN itu saja.

Kemudian, Pak LPSK, LPSK, Pak, ya. Di sini saya lihat bantuan psikologis sebesar 457 juta ya, Pak, ya. Bapak tidak ada rencana untuk merekrut psikolog, Pak? Jadi, *kan* besok... apa... *kan* artinya, mungkin lebih anu, ada orang-orang dari psikolog direkrut saja tentu, sehingga dikutip, kita mengeluarkan dana bantuan psikologi untuk... ya karena ini, semua anu, sangat perlu ini, Pak, bantuan psikolog. Jadi, nanti bisa merekrut orang-orang psikolog *gitu*, yang bisa jadi apa namanya... bisa untuk ini ya, memberikan apa... memberikan bantuan psikolog kepada yang tersangka ini.

Saya pikir itu, Pak, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Baik, yang terakhir Pak Hinch

F-PD (DR. HINCA I. P. PANJAITAN XIII, SH., MH., ACCS):

Terima kasih, Pimpinan

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang sangat saya hormati, Para mitra kerja, Sekjen KY dan Tim, BNN dan pejabat utama, Komnas HAM, LPSK, juga BNPT, Komnas Perempuan, serta tim yang hadir,

Terima kasih untuk diskusi kita hari ini. Saya mulai lebih dahulu dari... izin dulu, BNPT. Kami coba membaca dengan cermat dokumen yang disampaikan Pak Boy juga penjelasannya.

Tentu kita sepakat dengan cara-cara kerja yang dilakukan ini, termasuk tindak lanjut temuan BPK untuk memperbaiki sistem. Saya masih berkesempatan hari ini untuk melanjutkan lagi apa yang sudah saya sampaikan dalam dua tahun terakhir, nanti juga sama dengan teman-teman BNN, ialah peta jalan atau peta... sebutlah tadi kali semua atau apa pun istilahnya di BNPT, dengan cara mendapatkan peta yang jelas, kita tahu apa yang kita buat, kita tahu berapa anggarannya, dan seterusnya. Misalnya, soal deradikalisasi, misalnya tentang pencegahan, misalnya tentang kontra radikalisasi, dan seterusnya.

Saya ambil contoh, Pak Boy, dulu ketika di Sumatra Utara kita diskusi ini, kalau nanti saya kurang pas mohon dikoreksi ini, Romo. Hampir semua kita tidak pernah membayangkan akan muncul dari kota Sibolga, waktu itu, di era itu, tapi kemudian kejadiannya meledak *di situ*.

Nah, ini salah satu contoh saja, bahwa peta menjadi penting sekali, untuk paling tidak mendekati perencanaan pembiayaan kita. Karena itu, apakah peta itu sudah ada dan apakah anggaran kita untuk tahun depan dan seterusnya, lima tahun, sepuluh tahun ke depan peta itu, paling tidak mendekati, karena itu hasil riset, hasil penelitian untuk lebih akurat lagi mendeteksi dini.

Itu saja yang saya ingin tanyakan ke BNPT supaya anggaran yang akan kita siapkan ini menjadi pas untuk kerja-kerja yang lebih baik lagi ke depan. Tidak usah khawatir, termasuk yang waktu Pak BNPT mengumumkan kampus-kampus, ya, sudah kalau memang kampus kita ini ter... apa namanya... terduga akan bisa disusupi, ya harus cepat kita masuk begitu. Daerah-daerah juga harus cepat kita masuk dan seterusnya.

Saya ingin menyampaikan satu contoh, di Sumatra Utara misalnya, daerah-daerah perkebunan yang jauh juga bisa menjadi perhatian kita untuk memetakan itu, karena jauh dari jangkauan, dan tentu daerah-daerah lain yang memang sudah kita siapkan, seperti juga disampaikan oleh BNPT. Pertanyaan saya adalah apakah anggaran yang akan kita siapkan ini telah... apa... mendasarkannya kepadanya. Itu saja dari BNPT.

Sekarang saya pindah ke BNN. Dan, terima kasih BNN. Dan ini, karena itu sampaikan ini, Pak Petrus, terima kasih. Hasil riset kita tahun 2022, yaitu Indoneisa drugs report 2022. Saya membacanya sangat detail sekali. Dan saya kira, saya setuju dengan hasil riset ini, sampai kemudian mengeluarkan peta, bahkan data yang sangat akurat per desa, per kelurahan di seluruh Indonesia, mana daerah bahaya, mana daerah waspada.

Saya ambil contoh, lagi-lagi ini di kampung saya, di **d**apil kami, Pak, tidak jauh dari Pak Damanik komisi ini, dari Siantar sana. Siantar ini, dari sekian puluh lahan ini, saya lihat bahaya semua dan itu betul. Bahwa beberapa waktu lalu saya sampaikan info ke Pak Petrus itu, menarik itu, dan itu selalu kita angkat. Ternyata memang situasinya seperti itu. Dan Sumatra Utara, prevalensinya itu terus-terusan ini, tiga tahun berturut-turut, dua ratus kita ini. Tidak membanggakan, tapi ini situasinya.

Pertanyaan saya adalah dan terus dengan program yang sangat bagus tadi ini, apakah kita memasukkan program ini berdasarkan dengan peta tadi itu? Peta tadi itu. Saya sepakat itu, karena ini saya harus mengapresiasi ini, Pimpinan. Karena ini yang kita minta dari waktu ke waktu, peta ini terus, agar dengan demikian kita tahu mencegahnya. Dan saya kira BNN sekarang fokus sekali dengan pencegahan-pencegahan ini dan penting sekali ini data-data ini.

Dan saya lihat metodenya juga bagus sekali. Bisalah, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya cocokan ini di Asahan, di Tanjung Balai, di Batu Bara, dan di Siantar yang tadi saya sebut daerah pintu masuknya itu, akurat ini penelitian ini. Dan kalau sudah begitu petanya, ya sudah. Kalau begitu, Pak Petrus, kita masuk saja, mau... (*suara tidak jelas di rekaman 1:46:52*) mau yang lain-lain begitu, dan tinggal kita perkuat kabupaten atau kota.

Ini kadang kadang-kadang saya, kalau kita buat... kota Medan misalnya, kalau kita pakai di sini waspada-waspada. Satu contoh, Pak, kelurahan Imbang Deli, bahaya tuh, kelurahan aja dapat. Berarti, negara lewat BNN telah memetakan ini dengan pas, saya setuju ini. Kalau begitu, saya cinta dengan teman-teman tadi, kenapa anggarannya kecil sekali *nih*? Karena sudah kita petakan, ini bahayanya.

Karena itulah, Komisi III selalu memita, Pak Petrus jangan ragu. Kita naikan saja anggarannya, karena ini sudah ancaman begitu besar. Yang Presiden Jokowi di era periode pertama pun sudah mengatakan darurat narkoba. Ini masuk bukti lagi ini untuk membutuhkan darurat narkoba sampai ke tingkat tiga. Ini penelitian kedua setelah penelitian pertama BNN yang di Makasar, yang mengatakan tidak ada satu desa pun di seluruh Indonesia yang tidak terpapar narkoba. Sekarang ke luar lagi, dari desa yang terpapar itu ada statusnya, bahaya, waspada, bahaya, waspada. Mari kita bicara dengan Kalpori. Ini sama saja *tuh*, narkoba, judi. Ini soal narkoba kita ini, Pak Petrus.

Di... tadi menyoal pencurian-pencurian kecil di perkebunan, sawit 1 jangjang, 2 jangjang sehingga kita ribut ini. *Kok* yang kecil-kecil ini dihukum, amat kecil, *gitu*. Tapi, setelah kita lihat, rupanya namanya STS, sabu tukar sawit, mula-mula begitu. Setelah dia dapat dan tergantung, STS juga, sawit tukar sabu. Berarti, main narkobanya bukan pidana tunggal, dia melekat kepada pencuriannya. Pencuriannya tidak tunggal pada narkobanya. Sehingga program yang harus kita lakukan, Pak Petrus, saya lihat ~~Itu~~ belum ada di sini, perkebunan, yaitu zero narkoba untuk perkebunan.

Mengapa begitu? Itu ada empat belas pusat perkebunan nasional kita yang menjadi tulang punggung APBN kita. Minyak goreng langka kemaren gara-garanya sawit. Sawit sekarang ada di plat merah, yang paling besar untuk Indonesia, kecuali swasta yang sekarang sudah ditanganni. Nah, 5 sampai 7% per tahun sawit-sawit itu dicuri untuk yang kecil-kecil tadi, karena narkoba tadi. Jadi, saya mau katakan, Pak Petrus, ayo kita tambahkan programnya, kita masuk ke sektor perkebunan, karena tadi itu STS, sabu tukar sawit, yang kemudian sawit tukar sabu.

Ini kita ada kesempatan kita ini untuk memasukan anggaran ini. Dan karena ini di Dapil saya ini, paling besar di PTPN II, di daerah Langkat dan Binjai, PTPN III Asahan, Batu Bara, dan Simalungun. *Nah*, kalau PTPN IV ini ditempatnya Ketua Komnas HAM. Ini dia, kebun-kebun kita ini.

Nah, jadi, saya sekali lagi berterima kasih kepada data ini. *Nah*, saya minta, Pak Petrus, pakai data ini kita, Pak. Pakai data ini aja, mau yang di kota, mau yang di desa

kita pakai itu. Kita kasih tahu sama kepala BNN kita di situ, kalau 6 bulan ini tidak turun statusnya, ah, copot saja Kau, tak kerja Kau. Kira-kira begitu sajalah.

Kalau kemudian kota itu tidak dibantu P4GN-nya oleh Wali Kota atau Bupati atau Gubernurnya, Pak Petrus umumkan saja. Pemdanya, baik provinsi maupun kabupaten kota tidak berpihak kepada kita untuk melindungi warga kota, warga desa. Saya kira begitu. Karena yang saya dengar di bawah, ini pemerintah kabupaten kota dan provinsinya *cuek-cuek* saja. “*Kan* sudah ada BNN. Itu urusan dia”. Padahal, angka kita masih terlalu kecil untuk ini. Jadi pada Inpres, yang mereka wajib ke situ, P4GN yang miliknya BNN, saya kira ini.

Oleh karena itu, kesimpulan saya, mudah-mudahan Pak Petrus setuju *nih* dengan saya ini, data hasil penelitian 2022 ini kita gunakan.

Yang kedua, masih data lagi, saya terima kasih, karena waktu itu kita bicara juga mana jaringannya? Hari ini Bapak kasih tahu ini jaringannya. Jaringan ini, jaringan ini, jaringan ini.

Pertanyaan saya adalah apakah sudah ada, Pak, anggaran khusus mau membongkar jaringan ini, Pak. Ini kita ngomongin anggaran *nih*. Untuk apa kita buat daftar jaringannya, ini jaringannya, ini jaringannya, kaya klasemen liga Inggris, tapi kita tidak lakukan. Kalau menurut saya, sekali lagi, mengapresiasi daftar jaringan itu.

Pertanyaannya, ayo mau kita apain ini. Jadi, misalnya karena ada jaringan Malaysia, saya dengar waktu zamannya Pak Arman Depari, BNN pernah tanda tangan kerjasama dengan Malaysia. Iya *kan*, Pak? Menurut saya, itu batalkan saja itu, Pak. Orang semuanya datangnya dari sana *kok*, begitu, mana kerjasamanya, *gitu*. Jadi, kalau Kau nanam 62 katong *ngajak* kita Polga yang Malaysia, yang soal-soal politik waktu itu, hari ini saya mau bilang, banyak bandar narkoba dari Malaysia itu.

Nah, negara tentu ada di tangan BNN, ada di tangan Kepolisian. Kita tahu betul asal ditangkap jaringan Malaysia, terus, itu terus. *Nah*, kali ini kita ajak perang ajalah Malaysia kepada bandarnya, bukan negaranya, bandarnya itu, karena kita menjadi tempat saja pembuangan, *gitu*, kita cuci piring saja.

Nah, usul saya, Pak Petrus, dua tadi, jaringan tadi itu, saya minta kalau belum ada anggarannya, Pimpinan, minta di TU BNN, agar dimaksukan anggaran untuk memerangi jaringan itu, bagaimanapun caranya, ahli-ahlinya, Pak Petrus ahlinya.

Kedua, perkebunan. Ayo, kita selamatkan perkebunan kita karena dia benteng yang paling akhir untuk APBN kita, sekaligus minyak goreng, dan sekarang di sana, ya itulah, STS tadi. *Nah*, sawit tukar sabu, sabu tukar sawit, kira-kira begitu.

Untuk KY. Terima kasih *nih*, Pak Petrus ya. Pak KY, gini. dari semua ini, saya baca dengan seksama, saya berfokus tentang rekruement calon hakim agung. saya kebetulan lama di PSSI ini, urusan sepak bola ini, walaupun prestasinya belum

nampak-nampak, tapi paling tidak semangat lebih baik untuk membentuk timnas. Pasti ada, namanya tim talent sporting, tim pencari... (*suara tidak jelas*) pemandu bakat untuk timnas.

Saya ingin menyatakan kepada KY, coba kita ubah, calon-calon hakim agung kita itu sudah ada petanya lagi hari ini *tuh*. Berapa hakim-hakim a... hakim-hakim yang berprestasi di tingkat pengadilan tinggi, berapa di Ketua Pengadilan Negeri itu ada datanya. Lalu kemudian, Bapak-Bapak harus melakukan Bimtek dan mempunyai data, siapa mereka yang layak jadi timnasnya. *Kan*, kira-kira begitu. Jadi, jangan tunggu pengumuman, diumumkan, silakan mendaftar. Bahwa ... (*suara tidak jelas* di rekaman 1:54:11). *Enggak* ada yang mau masuk itu, Pak.

Yang betul adalah beri kepada seluruh hakim yang ada di Indonesia, ada peluang untuk menjadi calon hakim agung. Undang-undang menyebut 60, ... (*suara tidak jelas* di rekaman 1:54:24) tahun depan pensiun sekian, tahun depan pensiun sekian, kita butuh sekian, oke, Pak.

Jadi, kita ingin mendapatkan hakim-hakim agung yang terbaik sebagai... kalau istilah sepak bola tadi timnas. Jadi, KY harus menjemput bola itu. Pertanyaan saya, apakah sudah cukup anggarannya, sudah punya petanya, dan Anda punya *database* itu siapa saja. Kira-kira begitu, Pak.

Kalau soal nanti calon hakim agung lebih banyak dilaporkan, kalau saya itu menganggapnya biasa saja. Kenapa? Semakin banyak perkara yang diputuskannya, semakin banyak yang *enggak* suka sama dia, maka yang melaporkan tentu yang tidak suka. Kalau *enggak* ada yang melaporkan tentang dia, mungkin belum ada perkara yang diputuskan. Jadi, bukan itu ukurannya.

Kalau begitu, sekali lagi saya ingin *database*, apakah jumlah hakim kita yang ada yang sekarang berapa, berapa yang berpotensi, umurnya masih berapa, dan seterusnya, sehingga target KY, tahun berapa 60 hakim agung di Mahkamah Agung itu bisa kita peduli dengan segera itu.

Untuk Komnas HAM, saya kira ini juga kesempatan kita mengucapkan terima kasih, karena mungkin ini kesempatan Komnas HAM periode terakhir ini untuk menyiapkan anggaran ini. Anggaran ini anda siapkan untuk nanti yang akan datang. Oke, saya kira saya mesti mengapresiasi kawan-kawan untuk Komnas HAM, juga di teman-teman di Komnas Perempuan.

Perdebatan kita soal anggaran ini selalu menjadi persoalan kita dan kita tidak bilang terima kasih, tapi buat 2 bulan terakhir ini atau 6 bulan terakhir ini Komnas HAM, sekali lagi, tampil di publik, mulai dengan kasus di Langkat, kemudian kasus Brigadir J. Nanti kalau *enggak* ada kasus itu kelihatannya Komnas HAM hilang lagi. Jadi, timbul tenggelam dia, tergantung.

Saya ingin mengatakan tadi, teman-teman Komnas HAM, untuk membuat anggaran ini, saya kira teruskan saja, Pak Damanik, dan siapkan *deliver*, datang tampak muka, pulang tampak punggung. Saya kira begitu, *soft landing* untuk seluruh kawan-kawan di Komnas HAM. Respek dari saya sepenuh-penuhnya untuk kerja-kerja kordinasi kita selama ini, tapi masih Anda sempatkan memperjuangkan anggaran ini supaya siapa pun yang menggantikan, tetap Komnas HAM menjadi acuan kita semua.

Nah, saya kira terakhir untuk Komnas Perempuan. Saya penuh mendukung Anda apa pun programnya tadi, mudah-mudahan bisa nanti diseplitlah... (*suara tidak jelas di rekaman 1:57:06*) Komnas HAM supaya di urusan perempuan, usaha yang dipimpin itu harus diberi ruang lebih banyak ke Komnas Perempuan untuk bicara.

Saya kira itu saja, Pimpinan, mudah-mudahan masukan saya agak panjang, tapi saya kira ini penting untuk kita sampaikan. San saya mengapresiasi temen-temen Sekjen, BNN, Sekjen KY, BNN, Komnas HAM, BNPT, dan juga LPSK. Kalau LPSK sudah pastilah, Pak, jangan sampai malaikat tanpa sayap, sangat begitu *toh*, kalau itu tetap. Karena pernah saya ucapkan, Pimpinan, jangan sampai malaikat tanpa sayap, atau jangan sampai ada pun dia tak ganjil, tak ada pun dia tak genap. Tidak! LPSK menjadi tolak ukur negara memberi jaminan keadilan bagi saksi dan korban. Saya percaya itu dan karena itu menjadi instrumen utama dalam kita bernegara, sebagai negara hukum.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kita perpanjang dulu 30 menit ya, nanti para Bapak-Bapak kami kasih waktu 5 menit untuk menyampaikan jawaban. Yang di luar anggaran, *enggak* sudah dijawab. Saya perpanjang 30 menit.

(RAPAT: SETUJU)

Silakan, Kepala BNPT untuk menyampaikan jawaban kalau ada. Terkait anggaran saja, Pak, ya. Kalau di luar anggaran, *enggak* usah dijawab. Nanti saja jawabnya.

KEPALA BNPT:

Siap, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Lima menit.

KEPALA BNPT:

Tapi kami merespon apresiasi juga, selamat kepada Bapak Ketua, ini atas promosi doktrinya. Semoga ini semakin memperkuat narasi kita dalam menghadapi ideologi terorisme. Dan tentunya berkaitan dengan pertanyaan Bapak, kami menyesuaikan apa yang dipesankan paling penting.

Kemudian yang kedua, berkaitan anggaran yang disampaikan oleh Pak Safaruddin, 16 miliar, berkaitan dengan kerja sama internasional. Kami melaporkan di dalam Undang-Undang Nomor 5/2018, ada tiga pilar dalam konteks tugas penanggulangan terorisme.

Yang pertama adalah pilar pencegahan,
yang kedua koordinasi penindakan hukum,
yang ketiga kerjasama internasional.

Dalam kerjasama internasional itu ada tiga bidang. Yang pertama, adalah kerjasama bilateral; yang kedua, kerjasama multilateral; yang ketiga, adalah penguatan peraturan hukum internasional.

Jadi 16 miliar ini, kalau misalkan yang berkaitan dengan multilateral, itu juga keikutsertaan BNPT dalam kerjasama internasional menghadapi ataupun mengikuti berbagai kegiatan, seperti conference dalam *contra terrorism* yang dilaksanakan oleh badan-badan di bawah organisasi internasional atau seperti yang dilaksanakan oleh berbagai negara, misalkan ASEAN, Uni Eropa, dan sebagainya.

Sedangkan untuk bilateral, kita memiliki kerjasama bilateral dengan berbagai negara, contohnya dengan katakanlah dengan Yordania, Uni Emirat Arab, dengan Inggris, dengan Belanda, dengan Belgia, di kawasan ASEAN hampir seluruhnya, dengan Australia selalu ada aktivitas kegiatan yang saling mengunjungi. Mengunjungi dalam artian apakah kaitkan pertukaran intelijen, *capacity building*, dan juga *joint working group* yang bisa kita laksanakan antara negara-negara sahabat kita.

Jadi, dari berbagai... dari jumlah sahabat negara-negara asing yang menjadi mitra kita, dalam satu tahun anggaran ini juga tidak semua berhasil kita penuhi undangan undangan, termasuk kegiatan-kegiatan penandatanganan *memorandum of understanding*. Karena memang kegiatan terorisme ini sifatnya transnasional, jadi memang kerjasama internasional ini adalah salah satu yang ditonjolkan dalam upaya membangun semangat global dalam perang melawan terorisme.

Demikian juga penguatan peraturan hukum internasional, ini yang lebih banyak juga melakukan semacam ratifikasi terhadap peraturan-peraturan yang dihasilkan ataupun yang dikeluarkan UN atau Dewan Keamanan PBB untuk bisa kita wujudkan dalam peraturan hukum nasional kita. Jadi, ini adalah contoh-contoh kerjasama internasional yang diterapkan.

Kita bukan saja berkunjung ke berbagai negara, dalam konteks pertukaran informasi, berkaitan dengan *capacity building*, dan kita menjadi tuan rumah dari berbagai kegiatan even internasional. Banyak beberapa kegiatan kita menjadi tuan rumah, hari ini juga sedang berlangsung dengan beberapa lembaga-lembaga internasional, yang dilaksanakan di Bali oleh bidang kerjasama internasional kami. Termasuk juga, misalkan kita juga dalam minggu mendatang, kita akan menerima kunjungan dari Dubes (*suara tidak jelas 02:03:10*), mereka akan diskusi dengan kita di sini.

Demikian juga kita pernah menerima rombongan Lemhanas dari Inggris, kita juga pernah menerima delegasi dari berbagai negara yang ada di Asia. Mereka tentunya harus kita layani dan kita harus berikan secara baik dan bermartabat. Itu adalah contoh-contoh kegiatan internasional.

Kemudian, Bapak Hinca Panjaitan, pesan Bapak yang berkaitan masalah *mapping* itu terus kita sempurnakan, Pak. Jadi, tahun lalu kita sudah membuat aplikasinya. Hari ini indeks radikalisme terorisme pada provinsi itu sedang kita sempurnakan. Tetapi, dengan survei lembaga-lembaga lain, seperti Alvara Research Center ataupun dengan lembaga-lembaga *reseach* seperti BPS misalkan, kita telah juga melaksanakan target (*suara tidak jelas di rekaman 2:04:12*) terkait masalah untuk resiko terorisme dan setiap tahun itu kita rilis. Tahun lalu di Bandung, 2021 kita rilis dengan angka yang cukup baik. Mohon maaf, ini sudah kami sampaikan.

Dan Desember nanti kami juga merilis index resiko terorisme di tahun 2022 ini. Sedangkan untuk index radikalisme per provinsi, ini kami kategorikan sebagai dokumen intelligen, Pak. Jadi, di situ kami akan mendapatkan gambaran provinsi mana, di kota-kota mana, yang tentunya nanti penguatan program program itu bisa kita laksanakan.

Sedangkan untuk anggaran yang kalau istilahnya penyusunan, misalkan *multiyears*, 5 tahun ke depan, salah satu contoh adalah yang hari ini juga sudah kita laporkan sesuai dengan petunjuk arahan Bappenas, dari pertemuan RDP dengan Komisi III beberapa waktu lalu kita sudah laporkan juga, yaitu program bersumber dari pinjaman luar negeri, Pak.

Kami diikutsertakan, kita juga susun *multiyears* Pak. Itu juga penguatan dari berbagai sisi sarana prasarana yang ada di BNPT tentu sampai tahun 2024, Pak. Tetapi itu kami masih mengikuti ketentuan-ketentuan yang hari ini masih dibahas di Kementerian Keuangan dan belum ada kabar baiknya. Jadi, kami juga mohon, mudah-mudahan ini dukungan dari Komisi III ya, akan melahirkan kabar baik, sehingga penguatan BNPT dalam lima tahun ke depan ini, termasuk penyiapan pusat kerjasama internasional, berkaitan dengan masalah pusat pengendalian krisis, itu juga menjadi lebih sempurna lagi. Jadi, sementara yang dapat kami laporkan seperti itu.

Berkaitan dengan masalah *mapping*, Pak, ini berjalan dan kami juga menggunakan konsultan dari Lemhanas, Pak, manfaatkan saja, *mapping*.

Demikian juga untuk di Sumatra Utara, Pak. Kebetulan kami juga minggu mendatang ini melaksanakan kegiatan hari, kegiatan tiga hari di Sumatra Utara, Pak, dengan FKPPT, UWINSU. Kami juga akan berkunjung ke USU, kami juga akan berkunjung ke Universitas Dharma Agung untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan, kontra radikalisasi bersama-sama unsur-unsur civitas akademika yang ada di Sumatra Utara.

Sementara dari kami demikian. Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

BNN, silakan.

KEPALA BNN:

Terima kasih, Pimpinan. Kami akan... sesuai dengan arahan Pimpinan, kami menjawab yang berkaitan dengan anggaran.

Terima kasih dukungan dari Pak Ichsan yang selalu mendukung BNN dalam program-program. Perlu kami laporkan, Pak, untuk anggaran rehabilitasi BNN, kita 77 miliar sekian. Jadi, memang ini kalau kita lihat dari hasil prevalensi, Pak, bahwa kita lakukan penelitian tadi yang disampaikan Pak Ichsan, sekarang itu masuk ke 1,95, naik 15%. Berarti ada sekitar 3,6 juta. Ini juga yang kita betul betul seleksi, sehingga kita *combine*, Pak, antara Program Desa Bersinar dan IBM Intervensi Berbasis Masyarakat. Ini kita lakukan, karena kalau kita anggarkan untuk yang seperti di balai yang lokal, memang anggaran terbatas untuk itu. Tapi, kita berusaha dengan program yang kami sampaikan, kemudian anggaran yang ada untuk kita lakukan boleh dikatakan baru 306 miliar. Itulah anggaran yang disiapkan karena terlalu banyak yang terpapar yang harus kita lakukan. Tapi kita selektif, kita katagorikan seperti tentang disampaikan bahaya dan waspada.

Kemudian Pak Arsul, kita bicarakan dua indikator saja. Walaupun yang tadi Bapak sampaikan kedua kita kurang, tapi kami naik, Pak. Justru kami akan minta dukungan ke Bapak karena... dan tentunya Anggota Komisi III yang terhormat, karena indikator yang kedua, dikaitkan dengan reformasi birokrasi kami sudah mencapai nilainya 75,38, Pak, dari tahun 2020, 71,80. Jadi, naik 3,51.

Berarti, kalau dengan penilaian seperti ini, itu bisa untuk pembayaran remunerasi kepada pegawai kami 80%, Pak. Jadi, mohon, Pak, dukungan kepada BNN, sehingga kalau mereka terbayar sudah lebih baik, Pak, contohnya, anggota Polri, Pak, yang berada di kami. Polri itu dia dibayar remunasinya 80%, tapi di BNN belum, Pak. Jadi, ini... dengan dicapainya ini, Pak, walaupun tadi Bapak sampaikan kurang, tapi ini sudah lebih, Pak, dari pada target yang kita lakukan dalam delapan Area Perubahan, yaitu Magement Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem, Penataan Akuntabilitas, Peningkatan

Kualitas, dan Penguatan Pengawasan, dari dua indikator kinerja. Jadi, kami terima kasih.

Kemudian, index P4GN juga, dari 53,14 naik menjadi 54,7, Pak. Jadi, secara signifikan yang tentunya mendukung dalam rangka program keseluruhan. Dan saya lihat Bapak sangat jeli melihat program kami. Terima kasih dukungan dan sekali lagi kami mohon dukungan Anggota Dewan untuk kenaikan remunerasi pegawai BNN, karena untuk Reformasi Birokrasi, kami sudah cukup nilainya, sudah lebih dari 75, merupakan kebanggaan juga bagi saya sebagai Pimpinan untuk....*(rekaman tidak jelas 2:10:29)*

Kemudian berikutnya, terima kasih dukungan Pak Heru berkaitan dengan Desa Bersinar. Desa Bersinar ini selalu... saya juga sudah jelaskan digabungkan juga dengan program Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat. Memang, seperti Bapak sampaikan, Pak, dari sekian ribu desa yang ada, ini sama sekali, sama juga dengan masyarakat adil dan makmur. Ini tujuan kita, Pak.

Jadi, saya... tujuan saya juga membuat Indonesia Bersinar, tapi pelan-pelan, Pak. Jadi, satu desa yang dikategorikan dari bahaya, waspada, kita bisa bereskan desa tersebut, masuk... kita evaluasi lagi, Pak. Tidak bisa sembarang. Kita evaluasi lagi, apakah masih.

Karena saya selalu katakan, jangan sampai kita dengan anggaran yang ada membuat Desa Bersinar, tetapi setelah itu ketangkap lagi, ada bandar narkoba di desa tersebut, Pak. Jangan juga membuat Desa Bersinar yang cuma... misalnya hanya pemakai. Tapi, kita juga ada kategorinya yang kita fokuskan, sama dengan pertanyaan Pak Hinca tadi, yang bahaya, ini yang lebih bagus, kalau kita bisa lakukan di desa tersebut dengan anggaran yang ada, dan memang seperti tadi disampaikan juga Pak Hinca, tidak semua pemerintah kota, kabupaten ikut bersama-sama. Ini juga merupakan... jadi, jangan Bapak-Bapak juga datang ke daerah nyalahkan BNND terus. Memang sulit, sudah bagus bisa kerja itu.

Kemudian, kami tetap focus, Pak, seperti yang Bapak sampaikan, baru untuk di sekolah tentunya, karena peredaran ini banyak juga masuk di sekolah. Bagi kita bekerjasama dengan kementerian, Pak, kemudian Pemerintah. *Enggak* bisa sendiri Pak, duitnya enggak cukup. Jadi, kita... sekolahnya lebih banyak lagi, Pak. Sekolah *kan* lebih banyak. Kemudian, universitas tentunya.

Dan, tentunya yang saya fokuskan sekarang, Pak, saya selalu katakan, setiap Senin, Pak, kita evaluasi, bukan hanya penangkapan, tetapi bagaimana bisa menyelamatkan orang dengan rehabilitasi. Itu selalu kita beri evaluasi. Itu dengan rehabilitasi. Terima kasih masukan Bapak.

Kemudian, Kakanda tercinta, ini Pak Safaruddin, walaupun lagi nelfon, saya jawab. Mungkin nanti perlu Bapak selesai telfon dulu, baru saya jawab, Pak. *Hold* deh.

Terima kasih, Pak, jadi desa yang kami sampaikan tadi, Pak, memang agak berbeda, karena kita menjaga, sekarang ada namanya taman kratom, Pak. Kratom ini belum diatur dalam undang-undang. Kita lagi usulkan dalam proses, sehingga pada desa-desa yang Bapak sebutkan, bukan di kota, karena tanaman ini berada di sungai, tapi belum diatur, Pak, belum diatur dalam undang-undang maupun dalam peraturan menteri kesehatan. Namun, hasil penelitian ini dan menjadi objek juga, Pak, di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat dan di Eropa menjadi tanaman pengganti untuk orang dalam proses rehabilitasi. Ini juga kalau menurut penelitian dia 13 triliun... (*rekaman tidak jelas di 2:13:46*). Kemudian kami setuju, Pak, kalau Bapak ikut, apa lagi mantan Kapolda, Pak.

F-PDIP (Drs. H. SAFARUDDIN):

Maksud saya, di sana jadi, tapi maksud saya kadang tempat....

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak.

F-PDIP (Drs. H. SAFARUDDIN):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bapak temen saya, silakan, bebas.

F-PDIP (Drs. H. SAFARUDDIN):

Maksud saya dikembangkan ke Samarinda dengan Balikpapan, yang memang banyak mengkomsumsi anu, komsumsi narkoba itu demikian. Target kita *kan* narkoba. Jadi, ada orang-orang di sana diperdayakan untuk ada usaha selain itu, jual narkoba. Itu aja, Pak

KETUA BNN:

Iya, Pak. Untuk itu, kami sampaikan juga, Pak, kita membangun laboratorium di Kalimantan Timur, karena kita tahu mantan Kalpodanya amat sangat melawan narkoba. Jadi, kita membangun, Pak, dalam proses, dan ini untuk ditambah dengan laboratorium juga dan rehabilitas, Pak.

Mudah-mudahan kita ini, nanti untuk penggunaan kami lapor Bapak. Terima kasih atas dukungan.

Kemudian, untuk pengawasan, Pak, pengawasan. Ini amat sangat ketat, Pak. Dalam kepemimpinan kami belum ada satu gram pun yang bocor untuk pemusnahan. Jadi, amat sangat ketat kontrolnya dan kita ada inspektorat khusus untuk pengawasan ini dan melakukan pada waktu proses pemusnahan barang bukti.

Terima kasih dukunga dari Bapak.

Kemudian untuk Pak Hinch, karena berkaitan dengan larangan, kami setuju, Pak, semuanya yang disampaikan Bapak tadi, karena secara ilmiah juga kita ukur, bukan hanya dengan kegiatan praktis, tetapi dengan kegiatan *research* dan kerjasama juga dengan badan *research* dan Pusat Statistik, Pak, dan itu betul-betul valid datanya. Dan memang di tempat Bapak, saya juga menempatkan orang-orang dari kampung Bapak di sana, karena memang kondisi orang di sana memang agak berat, Pak. Jadi... jadi, memang kami lakukan itu, Pak, untuk bagaimana untuk bersih narkoba, sehingga semua atensi Bapak saya langsung *follow up* untuk berkaitan dengan daerah-daerah tersebut.

Kemudian, berkaitan dengan perkebunan, Pak, memang benar itu, Pak, sabu tukar sawit, sawit tukar sabu, itu benar. Saya baru balik dari Riau kemarin, kemudian kita baru melaksanakan interdiksi, operasi interdiksi, dan kita menyita lebih dari 170, dari 174 kilo sabu. Dan potensi pasarnya itu di daerah Riau, karena banyak sawitnya, Pak. Jadi, memang ini menjadi potensi kita. Dan, memang bukan cuma di tempat sawit, Pak, di tempat-tempat pertambangan yang lain, di Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan tempat-tempat lain potensi dari yang seperti Bapak sampaikan tadi, untuk memang ada pencurian dan sebagainya, tetapi juga mereka pakai itu untuk... dia bilang *booster*, Pak. Dia bisa bekerja, bisa *overtime* dia bekerja untuk menghasilkan lebih banyak, padahal salah dia. Dia tidak lakukan minum vitamin, tapi dia menggunakan barang-barang terlarang dan sebagainya.

Kemudian anggaran kita cukup, Pak, misal tapi memang kalau sudah bulan-bulan begini habis, Pak, karena *kan*, kita *kan* *mbackup* kepada 34 BNNP dan juga 173 BNNK, dan anggaranya hanya 187 miliar 878,400, tapi kami, kalau... maaf kata, kalau dilihat dari hasil yang kami dapat 3,3 ton kali 1 miliar, itu lebih besar dari anggaran kita. Itu kalau kali 1 miliar, padahal harganya bisa 1,5 miliar per satu kilo. Di daerah timur, di kampung saya, Pak, di Manado sana, dan seterusnya Ambonlah, harganya lebih mahal, sekitar 3 juta, 3,5 juta satu gram. Itu pun baru *average*, karena kita lakukan operasi untuk *supply* dan *demand* di wilayah barat, di wilayah timur, *liat* harganya lebih mahal.

Kemudian, Bapak tadi katakan dengan Malaysia, kami juga menangkap, Pak, tentunya dengan tentara dari perbatasan dan operasi yang dilakukan dari Batam itu ada Clandestine Laboratory dari Malaysia, mereka dikirim dari Malaysia, Pak. Sekarang *chemist*-nya yang dikirim dari Malaysia dan bekas polisi, Pak. Jadi, membuat itu dan sudah sempat dia kirim ke Jawa Timur.

Kemudian kalau kita lakukan *rew-planning and execution* di... di Wilayah Batam, Jadi, dengan barang bukti, Clandestine Laboratory, mereka selalu sewa rumah, sewa rumah 50 juta satu bulan membayar, kemudian bisa membuat sekitar 5 kilo... (*rekaman suara tidak jelas...2:19:14*) Kemudian yang sekarang, Pak, perlu saya sampaikan kami banyak menggalakan dengan operasi operasi di laut, karena boleh dikatakan 95% masuk lewat laut, dan berasal dari *golden triangle*.

Kita juga sekarang harus berfikir untuk kerjasama, karena geopolitik di negara-negara yang adanya itu perlu juga menjadi catatan bagi kita, karena kami sudah kerjasama dengan DEA. DEA juga tidak ada perwakilan negara tersebut, setelah itu tidak diberikan visa. Jadi, kita bisa lihat tantangan harus kita hadapi. Dan kami akan menaruh perhatian seperti yang Bapak sampaikan untuk di wilayah Sumatra Utara, karena harga sabu, Pak, methamphetamine paling murah di seluruh Indonesia di kampung Bapak.

Begitu, Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan LPSK. Singkat, Pak, ya.

KETUA LPSK:

Terima kasih, Pimpinan, nampaknya LPSK tidak terlalu banyak berhubungan dengan laporan keuangan, kecuali tadi yang ditanyakan Pak oleh Saparuddin.

KETUA RAPAT:

Sebentar, saya perpanjang dulu 10 menit.

(RAPAT: SETUJU)

Ya sebentar, Pak, Pak Suding.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Terima kasih, Ketua. izin terlambat, Pak Petrus. Saya betul-betul mengapresiasi kinerja Pak Petrus dan jajaran di BNN. *Nah*, paling tidak dalam tiga minggu terakhir ini, Pak Petrus dan jajaran berhasil mengungkap 177 Kg sabu dan ekstasi puluhan ribuan, ada 19.700 butir ini dalam tiga minggu terakhir ini. Saya kira ini sebagai prestasi kita dan ada 7 tersangka tersangka, 1 di antaranya ditembak mati.

Ya, saya setuju, Pak, ditembak saja. *Kan* dari dulu saya minta anggaran BNN untuk dipersenjatai, para bandar-bandar dan mafia ini. Kalau melihat realisasi anggaran 2020 dan 2021 ya, saya kira ini cukup maksimal dan anggaran-anggaran sebelumnya kalau memang kita memiliki kotmimen yang kuat ya, dalam kaitan masalah

pemberantasan narkoba ini, saya kira memang anggaran ini sangat sedikit. Cukup banyak hal yang harus dilakukan oleh BNN terkait dalam masalah ini. Ketika politik anggaran kita memang minimal, ya, terkait, ini adalah berkali-kali Pak Jokowi menyampaikan bahwa negara kita adalah darurat narkoba, kita punya komitmen yang kuat dalam memberantas ini, saya kira memang politik anggaran juga harus memihak kepada BNN.

Makanya dalam forum ini ya, dalam rapat anggaran ini, saya mendukung sepenuhnya, agar anggaran BNN ini betul-betul diperjuangkan dalam Badan Anggaran, agar ada penambahan, baik itu menyangkut masalah pemberantasan narkoba. Dan ini seperti yang disampaikan kawan-kawan dan juga pada rapat-rapat sebelumnya, dan bahwa hari ini peredaran narkoba sudah sangat masiv. Dan dari berbagai jaringan-jaringan antarnegara, ini memang Indonesia menjadi pasar.

Dan tentunya Pak Petrus sangat mengakui, apalagi dengan bergabungnya siapa tadi, Direktur Narkoba... dari Aceh, Pak ya, Pak Rudi ya? Wah, ini *kan* ..., mana Pak Rudi Setiawan? Oh, belum cukup umur ya? Oh, dia belum cukup umur. Saya dengar sudah ditarik ke BNN dan ini, anak ini memang apa, dari ini... dia... apa namanya... di akhir juga cukup kita lihat *kan*, jejak rekamnya dalam kaitan masalah pemberantasan pengedaran narkoba ini oleh Rudi Setiawan, begitu. Begitulah pada saat dia bertugas di Bali. Dan betul, Pak, saya sepakat ditarik ke BNN, ya, sebagai pendamping. Kandidat yang baik dalam memberantas narkoba. Kita melihat bagaimana cara untuk menangkap para bandar-bandar itu, Rudi Setiawan ini.

Itu yang saya ingin sampaikan, Pak, untuk BNN. Pak Pangeran, saya kira rekomendasi kita, BNN ini betul-betul menjadi perhatian kita agar ini diperjuangkan dari sisi anggaran, karena banyak hal yang memang harus dilakukan dalam memberantas narkotika. Saya kira itu, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Hasto. Maaf, terpotong, lanjut.

KEPALA LPSK:

Saya merespon apa yang ditanyakan Pak Safarudin tadi, mengenai anggaran untuk keperluan rehabilitasi psikologis. Memang ada dilemma, Pak, kalau rekrutmen tenaga psikolog, karena psikolog itu biasanya jarang yang jadi PNS juga ternyata.

Kemudian yang kedua, biasanya psikolog yang boleh berpraktik itu lebih menekuni dunia prakteknya ya, ketimbang untuk menjadi tenaga tetap di suatu instansi, kecuali kalau barang kali di tempat swasta ya. Tapi, alhamdulillah selama ini kita karena sudah ada MOU dengan HIMPSI (Himpunan Psikolog Indonesia), itu hal-hal yang berkaitan dengan layanan sklogis bisa kami atasi dan alhamdulillah saat ini di LPSK salah satu pimpinannya adalah seorang doktor psikolog. Di sini ada Ibu Lifia.

Silakan berdiri dan dibuka maskernya, Bu.

Ini, kebetulan adalah psikolog yang mengkoordinir juga untuk kegiatan-kegiatan layanan psikologis. Dan, selain itu ada dua orang staf yang kebetulan alumni Fakultas Psikologi. Tetapi, karena ini termasuk *fresh graduate*, jadi masih belum bisa praktek. Oleh karena itu, kami tetap mempergunakan jasa rekan-rekan dari Himpsi dalam melakukan (*rekaman suara tidak jelas 2:26:14*). Karena itu, memang jauh lebih *simple*. Seperti halnya kalau kita akan melakukan *replacement* untuk para korban terorisme. Jadi, kita mempergunakan jasa dokter forensik yang kami kerja sama dengan perhimpunan dokter forensik Indonesia, karena memang tidak ada tenaga dokter forensik yang ada LPSK. Tapi itu tidak terlalu menjadi... apa... gangguan bagi kami

Yang lain, itu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Heru Widodo maupun Pak Ikcsan tentang rumah tahanan yang kami gagas dan kami usulkan dan kami memang memerlukan dukungan dari Bapak dan Ibu di Komisi III ini. Rencana memang rumah tahanan ini kami rasakan keperluannya untuk *justice collaborator*. Karena apa, karena kalau *justice collaborator* ditempatkan di rumah tahanan aparat penegak hukum, apalagi penyidik, tentu akan rawan dengan *conflict of interest*. Kesaksiannya bisa diarahkan dan sebagainya.

Nah, oleh karena itu, kami ingin mengusulkan ada rumah tahanan khusus untuk *justice collaborator* ini yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Karena, ini juga sekaligus bisa menjadi... apa ya... iming-iming kepada calon *justice collaborator*. Yang... orang yang sadar bahwa dia akan menjadi saksi dalam suatu peristiwa tindak pidana dan dia bisa menjadi *justice collaborator*. Dia akan mendapatkan layanan dalam bentuk penempatan di rumah tahanan yang khusus. Dan ini kita bisa dengan apa... bangun dengan ...(*rekaman suara tidak jelas 2:28:18*)

Ini berbeda dengan rumah tahanan, karena seseorang ditempatkan di rumah aman itu, dia bukan seorang tahanan, tapi dia adalah seorang yang diamankan. Dalam arti, memang diamankan. Bukan diamankan dalam arti ditahan. Dan fasilitasnya tentu saja berbeda dengan rumah tahanan.

Oleh karena itu, mengawali gagasan kami nantinya, kami sudah *sounding* juga dengan Kemenkumham. Pak Menteri juga sudah setuju, tetapi sebelum ada tindak lanjut yang... apa... cukup maju. Nanti barangkali kami akan memerlukan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di Komisi III ini agar kami bisa merealisasikan adanya rumah aman untuk *justice collaborator* ini.

Itu tadi makanya Pak Heru Widodo menanyakan jaminannya apa ini LPSK bisa mengamankan tahanan yang ditempatkan di Bareskrim, sementara kasusnya sendiri berkaitan dengan Bareskrim juga.

Dari sisi itu, bisa. Tapi Alhamdulillah, selama ini kami bisa berkordinasi dengan Bareskrim dan kami bisa memberikan layanan perlindungan kepada yang bersangkutan dengan penempatan pengawalan di sana, 24 jam, *pake shift*, begitu, dan juga ada

CCTV-nya untuk bisa dimonitor setiap saat. Dan kami mendapatkan jaminan bahwa tiap proses yang dilalui oleh Barada E ini, LPSK dilibatkan. Termasuk ketika Komnas HAM bertemu dengan yang bersangkutan diminta keterangan, dia didampingi oleh LPSK untuk menjamin bahwa keterangan yang bersangkutan itu tetap konsisten dan yang bersangkutan tetap aman.

Saya kira demikian, Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya perpanjang dulu 10 menit lagi.

(RAPAT: SETUJU)

Silakan, Komnas HAM. Itu tanda artinya.

KETUA KOMNAS HAM:

Terima kasih, Pimpinan. Saya kira karena tadi tidak ada pertanyaan yang spesifik kepada Komnas HAM, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dari apa... masukan-masukan selama ini, sehingga kemudian dalam pengelolaan keuangan kami selalu dapat WTP dan mendapat penghargaan Kementerian Keuangan.

Ada satu hal mungkin tadi ditujukan kepada Komnas Perempuan. Karena induk satkernya Komnas HAM, saya ingin mengklarifikasi, nanti silahkan dijelaskan lebih detail. Soal dana hibah dari luar negeri, sebagai mana prosedur yang berlaku maka memang dana hibah untuk Komnas Perempuan sebesar 8.282.022.000 itu sudah deregister, Pak, dalam DIPA Komnas HAM, satkernya. Dana hibah ini datang dari UN Women dan... (*rekaman suara tidak jelas 2:31:28*).

Mungkin lebih detail Bu Andi bisa menjelaskan.

Yang terakhir, saya ingin menyampaikan, tempo hari kita pernah dalam satu RDP menyepakati ada rencana kerja bersama pengawasan Komnas HAM bersama Anggota Komisi III, saya kira untuk pengajuan tambahan anggaran kami akan coba ajukan dalam usulan tambahan yang akan datang.

Saya kira demikian, terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat siang,
Salam sejahtera,
Salam sehat,

KETUA RAPAT:

Ada yang mau disambung, Bu? Silakan.

KETUA KOMNAS PEREMPUAN:

Terima kasih, Pimpinan.
Terima kasih, Ketua Komnas HAM.

Untuk mekanismenya, Bapak, selama ini, acuan hibah Komnas Perempuan itu harus diketahui dan disetujui oleh Bappenas dan disahkan oleh Kemenkeu. Memang, kami juga harus... tentunya menginformasikan dan diizinkan oleh Komnas HAM untuk menerima hibah ini, karena untuk RPL-nya itu tetap menggunakan atas nama Komnas HAM.

Kami sungguh berterima kasih karena Komnas HAM turut merawat independensi Komnas Perempuan. Selama ini sama sekali tidak ada intervensi terhadap usulan program Komnas Perempuan. Tapi kami dibantu untuk berkordinasi dalam proses pengelolaannya, supaya administrasi ini juga bisa sejalan dengan administrasi APBN.

Tadi disampaikan bahwa untuk tahun 2021 nilai APBN, nilai dana hibah Komnas Perempuan yang diperoleh dari *UN Women FPA dan UN Women*. Yang mengkhawatirkan bagi kami adalah karena memang dana APBN untuk program sangat sedikit. Maka, dana-dana hibah ini sebetulnya bukan saja untuk mendukung program Komnas Perempuan, misalnya untuk pendidikan dan kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bahkan untuk mengatasi kekurangan dana untuk hal yang sangat rutin, seperti sambungan telepon khusus sistem TIK untuk pengaduan, karena lonjakan pengaduan itu *kan* hampir 80% di tahun 2021.

Kami juga menggunakan dana hibah ini untuk membangun *database*. Padahal, sedang didorong... kami mendapatkan surat dari Kemenko PMK, Kemenkopolkham, KSP, dan lainnya untuk big data Indonesia, tapi pengembangan *database*-nya tetap harus gunakan dana hibah.

Yang ketiga, bahkan karena pengaduan yang begitu banyak ya, kami selama ini menggunakan relawan. Karena di dalam RDP yang lalu saya menyampaikan bahwa di Perpres Komnas Perempuan yang sampai sekarang ini belum berubah, dan kami juga baru kemaren menyampaikan kepada Pak Mahfud selaku Plh di Kemenko PAN RB, eeh, di PAN RB, tapi Beliau juga sebagai Kemenko yang ditugaskan untuk disposisi dari Presiden, bahwa kami hanya dikunci 45 staf.

Karena itu, untuk menerima pengaduan yang melompat jumlahnya, untuk memverifikasi kasus dan lain-lain itu semuanya menggunakan dana hibah.

Jadi, ini sangat mengkhawatirkan. Apa lagi tahun 2023 kami tidak punya sebetulnya kepastian dana hibah tersebut. Itu mangapa...

F-PPP (ARSUL SANI):

Izin, izin.

KETUA KOMNAS PEREMPUAN:

Dukungan dari....

F-PPP (ARSUL SANI):

Pak Ketua, izin, saya mau tanya singkat saja. Ada tidak kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?

KOMNAS PEREMPUAN:

Ada Bapak, tapi bentuknya bukan anggaran. Bentuknya saat ini kami tentunya dalam koordinasi penanganan kasus, dalam sinergi *database* karena kita sedang mendorong Sistem Peradilan Pidana Terpadu IT yang dikembangkan bersama dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Yang kemudian kita sedang berkordinasikan agar ini bisa juga terhubung langsung dengan *database* Komnas Perempuan dan *database* dari KPPA, serta yang lainnya.

Nah, saya ingin mengakhiri dengan mengatakan, dengan kondisi seperti inilah maka perlu dukungan dari Komisi III untuk penambahan dana di tahun 2023 itu sangat penting bagi Komnas Perempuan dan kami sungguh memohon bantuan agar ini dapat di perjuangkan, terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Ibu, nanti kami sampaikan pesannya ke rekan-rekan Pimpinan lainnya.

Silakan, Sekjen KY.

SEKJEN KY RI:

Terima kasih, Pimpinan.

Dari Pak... yang terhormat Pak Ichsan Sulistio tadi, terkait dengan banyak temuan. Memang ini temuan dari beberapa tahun sebenarnya, Pak, terkait... maaf, Pak, terkait dengan banyak temuan yang BMN, Pak, terkait beberapa NUP (nomor urut pemesanan) yang menjadi temuan. Ini sebenarnya temuan dari beberapa tahun yang lalu. Ini merupakan kelalaian pencatatan BMN di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial beberapa tahun yang lalu, sehingga menjadi temuan, tapi semua temuan ini sudah kami tindaklanjuti. Insya Allah di tahun ini akan dapat diselesaikan. Bapak.

Kemudian, terkait yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Arsul Sani tadi, terkait dengan temuan BPK yang cukup signifikan. Ini kebanyakan temuan di kami ini terkait dengan administrasi, Pak. Kalaupun terkait dengan ada kerugian, itu jumlahnya masih tidak material, istilah dari BPK-nya begitu, Pak, makanya di kami masih diganjar dengan WTP.

Kemudian, terkait dengan Bapak yang tadi sampaikan ada dua sasaran strategis, kemudian ada tiga indikator sasaran strategis, yang mana ada dua indikator yang belum ditentukan. Sebenarnya kami di dalam... apa namanya... di dalam bahan rapat dengar pendapat ini, sudah ada. Pak. Ada di halaman empat, tabel satu tiga, di situ sudah disebutkan indikator kinerjanya. Untuk yang sasaran strategis dua pun sudah di... ada. Pak.

Untuk... kami bacakan, untuk sasaran strategis dua, yaitu meningkatkan kapasitas manajemen internal. indikator kinerja yang ditetapkan, yang pertama, adalah nilai akuntabilitas lembaga mencapai skor 80 pada tahun 2024, sementara untuk tahun 2021 kami baru mendapatkan angka 68,17, Pak.

Sedangkan untuk....

F-PPP (ARSUL SANI):

Pak Ketua, saya ada interupsi.

KETUA RAPAT:

Silahkan Pak Arsul.

F-PPP (ARSUL SANI):

(Suara tidak terdengar, bicara tanpa mikrofon 02:35:40... dihadirkan di DIPA, tapi NA ini, NonAvailable ini, (suara tidak jelas). (Suara tidak terdengar, bicara tanpa mikrofon 02:35:48...)

SEKJEN KY RI:

Ya, ya betul, Pak, di... iya. Pak.

F-PPP (ARSUL SANI):

(Suara tidak terdengar, bicara tanpa mikrofon)

SEKJEN KY RI:

Tapi ini ada penjelasan di halaman berikutnya, Pak, kami juga ini... di halaman berikutnya di 51 sampai... eh, 52 dan seterusnya ada keterangan tambahannya, Pak.

Begitu kira-kira. Kemudian yang terakhir....

KETUA RAPAT:

Ada, Pak Arsul? Silahkan, Pak Sekjen, lanjut.

Ya, nanti di-copy-kan.

Pak Sekjen, lanjut.

SEKJEN KY RI:

Siap.

Kemudian Pak Hinca terkait dengan seleksi hakim agung, Pak. Memang KY sebenarnya sudah melakukan juga pemetaan data calon hakim agung potensial, namun terbatas pada data yang ada sama kami dulu, Pak, sementara ini. Karena apa, saat ini kita sedang menjajaki pertukaran *database* dengan MA, karena memang *kan* semua calon hakim agung yang karir adanya disana semua, Pak. Jadi, kami mengelola data yang sementara ini ada pada kami dan kami juga sudah melakukan pembahasan dengan Mahkamah Agung terkait kriteria-kriteria apa untuk ditentukan sebagai calon potensial untuk jadi Hakim Agung, Pak. Namun, implementasi pemetaan *talent*-nya masih terhambat terkait *database* dan juga anggaran, Pak.

Kami belum dapat anggarannya yang memadai untuk... untuk bisa melaksanakan *talent scouting* itu, Pak, seperti ini.

Itu kira-kira, Pimpinan, terima kasih.

F-PPP (ARSUL SANI):

Sebentar... sebentar, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Arsul.

F-PPP (ARSUL SANI):

Saya tertarik kalimat yang terakhir ya. Belum mendapatkan anggaran yang memadai. Anggaran Bapak di tahun yang... apa... yang kemaren itu 2021 belum, tapi di 2022 itu *kan* Bapak sudah. Bapak mendapatkan peningkatan anggaran yang luar biasa dari Bappenas.

SEKJEN KY RI:

Siap.

F-PPP (ARSUL SANI):

Nah, apakah tidak dipergunakan ini? Saya harus mengingatkan ini, karena komitmen para Komisioner KY ketika *fit and proper test* di Komisi III ini adalah membuat bank data tentang hakim-hakim yang baik, yang tadi dimaksud oleh Pak... apa... Pak Hinchu. Jadi, itu mestinya harus terceminkan di dalam giatnya kesekjenan, *gitu loh*.

Tentu kami memang harus membantu nanti dalam rapat konsultasi DPR dengan Mahkamah Agung, ini harus kami angkat, *gitu loh*. Karena kami *tuh* ingin agar nanti bukan hakim itu *ngelamar*, hakim *tuh* dijemput, karena berdasarkan *record*-nya yang baik untuk menjadi Hakim Agung, *gitu loh*. Begitu, Pak Sudding, ya.

Saya kira itu, Pak, komentar saya. Makanya saya takut, karena ini 2021 *kan* belum barang kali. Yang 2022 *kan* Bapak sudah dapat peningkatan anggaran yang luar biasa itu dari Bappenas. Saya kira *enggak* ada Komisi apa... mitra Komisi III yang peningkatan anggarannya dalam... apa... dalam prosentase itu seperti KY, *nggak* ada *gitu*. Makasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Arsul. Masukan saja itu, biar...
Oke, silakan.

SEKJEN KY RI:

Terima kasih, Pak Arsul, Pimpinan.

Terkait anggaran untuk melakukan *talent scouting*, memang sebenarnya kita anggarkan walaupun tidak maksimal yang untuk tahun ini. Tapi kembali lagi, Pak, karena sebenarnya untuk anggaran seleksi calon hakim agung kami anggarkan untuk satu kali penyelenggaraan di tahun 2022 ini, Pak.

Nah, kemarin sudah digunakan di awal tahun, ada sis... adapun sisa anggaran sebenarnya untuk digunakan *talent scouting*, kami akhirnya sekarang terpaksa kami ahlikan lagi untuk penyelenggaraan seleksi calon hakim agung periode kedua ini, Pak. Jadi, akhirnya mungkin untuk anggaran itu juga tahun ini diahlikan untuk... untuk seleksi Hakim Agung lagi ini, Pak. Kebetulan kami baru dapat surat lagi dari MA terkait itu.

KETUA RAPAT:

Baik. Tolong ditayangkan kesimpulan kita. Saya bacakan ya, kesimpulan.

Satu, Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan laporan keuangan Pemerintah Pusat dan tindak lanjut Hapsem BPK tahun 2021 untuk Badan Narkotika Nasional,

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Komisi Yudisial RI.

Ada revisi, Pak? Ayo.

KETUA KOMNAS PEREMPUAN:

Pimpinan... Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Silakan, Bu.

KETUA KOMNAS PEREMPUAN:

Apakah boleh menambahkan Komnas Perempuan di dalam ini?

KETUA RAPAT:

Tambahkan, ayo. Bener juga Ibu.

KETUA KOMNAS PEREMPUAN:

Komisi Nasional....

KETUA RAPAT:

Kaya dianaktirikan, Bu, ya.

KETUA KOMNAS PEREMPUAN:

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, udah anggarannya dianaktirikan ya, Bu, ya, tapi kami akan perjuangkan, Bu. Insya Allah. *Nah*, ini setuju ya.

(RAPAT SETUJ, KETOK PALU 1X)

Dua, Komisi III DPR RI akan menyampaikan hasil rapat pembahasan laporan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 setiap mitra kerja untuk sinkronisasi di Badan Anggaran DPR RI yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

(RAPAT SETUJU)

Kepala BNN, Ketua LPSK, Ketua Komnas HAM Republik Indonesia, serta Sekjen KY Republik Indonesia, beserta seluruh jajaran,

Demikian.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Rapat kita skors sampai jam 2.

(RAPAT : DI TUTUP PADA PUKUL 12.10 WIB)

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

NOVIANTI, S.E.
NIP.196711041988032001